MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD

OPD : **Badan Keuangan Daerah**

PROGRAM : **Pengelolaan Pendapatan Daerah**

TAHUN : **2023**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah **Kegiatan :** Pengelolaan Pendapatan Daerah **Sub Kegiatan :** Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **Tujuan :**	- 90% pendapatan masih bersumber pada dana pusat (dana transfer) - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,	**Akses:** Kurangnya informasi bagi kelompok perempuan dalam hal pelayanan dan konsultasi pajak daerah **Partisipasi:** Kurangnya peluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi/penyuluh	- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pajak - Perlu adanya perubahan perda yang lama (Tahun 2011) - Belum tersedianya UPTD pada setiap kecamatan - Belum adanya Petunjuk Teknis	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak beserta manfaatnya	Meningkatnya jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender	-sosialisasi mengenai pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender - Juknis atas kesetaraan gender dalam sosialisi/penyuluhan terkait	- 90% pendapatan masih bersumber pada dana pusat (dana transfer) - Masyarakat yang melakukan konsultasi pajak daerah	**Program :** Pengelolaan Pendapatan Daerah **Kegiatan :** Pengelolaan pendapatan Daerah **Sub Kegiatan :** Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **Input :**

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang Responsif Gender	telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 - Total Pendapatan : 1.019.358.071.248,49 - Jumlah PAD : 78.882.919.152,49 - Jumlah Dana Transfer : 761.630.742.880,00 (10,36 % PAD disbanding Dana Transfer)	pajak daerah **Kontrol:** Yang berwenang dan para pengambil keputusan dalam pelayanan dan konsultasi pajak daerah masih belum memperhatikan kebutuhan gender dan belum semua masyarakat menyadari manfaat dari konsultasi pajak daerah **Manfaat :** Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam masalah pelayanan dan	kesetaraan gender dalam sub output sosialisasi/penyuluhan sehingga pelaksana tidak dapat menentukan kuota jumlah undangan perempuan dan laki-laki yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan					penambahan pendapatan pajak daerah **Output:** Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari berbagai unsur perempuan dan anak **Outcomes :** Persentase pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender

Dipindai dengan CamScanner

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		konsultasi pajak daerah						

Pulau Laut Timur, Maret 2022

BADAN KEUANGAN DAERAH

DASRIL, AP, M.Si
NIP 19[illegible]501 1 001

Tim Verifikasi :

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial PPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA	DASRIL, AP, M.Si	H. PARYANTO, S.Sos, M.T	BOBY PERDANA RIZA,S.STP,M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19[illegible]501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 20012 1 002

Dipindai dengan CamScanner

GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER *(GENDER BUDGET STATEMENT)*	
SKPD	**: BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**
TAHUN ANGGARAN	**: 2023**
PROGRAM	Pengelolaan Pendapatan Daerah
KODE PROGRAM	5.02.04
KEGIATAN	Pengelolaan Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
HASIL/OUTPUT	Layanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender
ANALISIS SITUASI	**Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).** - 90% pendapatan masih bersumber pada dana pusat (dana transfer) - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 - Total Pendapatan : 1.019.358.071.248,49 - Jumlah PAD : 78.882.919.152,49 - Jumlah Dana Transfer : 761.630.742.880,00 (10,36 % PAD disbanding Dana Transfer) **Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** Akses: Kurangnya informasi bagi kelompok perempuan dalam hal pelayanan dan konsultasi pajak daerah Partisipasi: Kurangnya peluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan terkait konsultasi pajak daerah Kontrol: Yang berwenang dan para pengambil keputusan dalam pelayanan dan konsultasi pajak daerah masih belum memperhatikan kebutuhan gender dan belum semua masyarakat menyadari manfaat dari konsultasi pajak daerah. Manfaat : Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam masalah pelayanan dan konsultasi pajak daerah **Sebab Kesenjangan Internal** - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pajak - Perlu adanya perubahan perda yang lama (Tahun 2011) - Belum tersedianya UPTD pada setiap kecamatan

Dipindai dengan CamScanner

	- Belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) atas kesetaraan gender dalam sub output sosialisasi/penyuluhan sehingga pelaksana tidak dapat menentukan kuota jumlah undangan perempuan dan laki-laki yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan **Sebab Kesenjangan Eksternal** Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak beserta manfaatnya		
RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan**	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Tujuan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari setiap unsur gender khususnya perempuan
		Alokasi Anggaran	Rp.150.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender		

Pulau Punjung, Maret 2022

ASRIL, A.P.,M.Si
NIP. 197502[illegible]199501 1 001

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial,P3APPKB
Drs. ANDY SUMANTO, CKA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL, A.P.,M.Si NIP [illegible]501 1 001	PARYANTO, S.Sos,M.T NIP 19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si Nip. 19820521 200012 1 002

Dipindai dengan CamScanner

FORM KAK/ TOR

Program		Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran Program		Kepala OPD, Instansi Vertikal, Masyarakat
Kegiatan		Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri no 67 tahun 2011 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
	Gambaran Umum	Di kab DM dari sekian OPD, Instansi vertikal tergabung mempunyai 38 OPD, 2 Instansi Vertikal. Untuk terlaksananya kualitas pajak yang baik maka perlu dilakukan konsultasi pelayanan pajak.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Indikator Kinerja	Meningkatnya jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah
	Batasan Kegiatan	Pada kegiatan konsultasi dibahas tentang peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah
Maksud dan Tujuan		Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari setiap unsur gender khususnya perempuan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui diskusi, pemaparan, tanya jawab
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Bidang PBB dan BPHTB Penanggung Jawab : Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp.150.000.000,-

Pulau Punjung, Maret 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEUANGAN DAERAH

ASRIL, SP, M.Si
NIP. 19750425 199501 1 001

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
MENGATASI KESENJANGANGAN GENDER
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

OPD : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
PROGRAM : **Program Kepegawaian Daerah**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Kepegawaian Daerah **Kegiatan :** Pengembangan Kompetensi ASN **Sub Kegiatan :** Assesment Center **Tujuan :** Terlaksana Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	- Jumlah PNS yang menduduki Esselon II Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang terdiri dari 27 laki-laki dan 1 orang perempuan. - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Syarat JPT Pratama :	**Akses:** Masih kurangnya Pejabat perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Ess.II **Partisipasi:** - Esselon II laki-laki lebih banyak dari pada esselon II perempuan - Persentase : Laki-laki = 95 % Perempuan = 5 % **Control:** Pentingnya komitmen bersama untuk memprioritaskan perempuan untuk menduduki jabatan Ess.II **Manfaat :**	- Keterbatasan Anggaran - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender dalam pemangku jabatan esselon. - Kurangnya pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender	- Kurangnya percaya diri dan minat PNS perempuan untuk menjabat Esselon II - Koordinasi antara BKPSDM dan Kepala OPD belum optimal	- Bertambah jumlah pejabat esselon II perempuan (responsive gender)	- Sosialisasi tentang pelaksanaan pengisian jabatan esselon II - Melaksanakan Pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk perempuan - Melakukan pendataan PNS perempuan yang memenuhi kriteria	Meningkatnya jumlah Pejabat Esselon II Perempuan 50 % dan Laki-laki 50 %	-Output Bertambahnya jumlah Pejabat Ess.II Perempuan -Outcome Tersedianya pemangku jabatan Ess.II responsif Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	1. Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana atau Diploma IV 2. Memiliki kompetensi teknis ,kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang ditetapkan. 3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. 4. Memiliki rekam jejak jabatan,integrit as yang baik. 5. Usia paling tinggi 56 (lima	Terjadinya keseimbangan antara pejabat Ess. II laki-laki dan perempuan						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	puluh enam) tahun. 6. Sehat jasmani dan rohani.							

Pulau Punjung, Maret 2022

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. YUSRISAL,SKM,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680324 199003 1 002

Tim Verifikasi			
Inspektur	**Kepala BKD**	**Kepala Bapppeda**	**Kepala Dinas Sosial P3A PPKB**
Drs.Andy Sumanto,CtrA Nip.196812201990091001	Asril, AP.M.Si Nip.19750226 199501 1 001	Paryanto,S.Sos,MT Nip.196906091989021001	Bobby P Riza S.STP.Msi Nip. 198205212000121002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

PROGRAM	**Kepegawaian Daerah**	
KODE PROGRAM	**5.03.02.**	
KEGIATAN	**Pengembangan Kompetensi ASN**	
HASIL/OUTPUT	**Bertambahnya jumlah pejabat esselon II perempuan**	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** ➢ Jumlah PNS yang menduduki Esselon II Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang terdiri dari 27 laki-laki dan 1 orang perempuan. ➢ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. ➢ Syarat JPT Pratama : - Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana atau Diploma IV - Memiliki kompetensi teknis ,kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang ditetapkan. - Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. - Memiliki rekam jejak jabatan,integritas yang baik. - Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. - Sehat jasmani dan rohani.	
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** ➢ Esselon II laki-laki lebih banyak dari pada esselon II perempuan ➢ Persentase : Laki-laki = 95 % *Perempuan* = 5 % **b. Penyebab Internal** a) Keterbatasan Anggaran b) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender dalam pemangku Jabatan esselon. c) *Kurangnya pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender* **c. Penyebab Eksternal** - Kurangnya percaya diri dan minat PNS perempuan untuk menjabat Esselon II, karena dilakukan Uji Kompetensi - Koordinasi antara BKPSDM dan Kepala OPD belum optimal	
RENCANA AKSI	**Komponen**	Penempatan ASN Sesuai Kompetensi
		Tujuan: Menempatkan Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi
		Alokasi Anggaran: **275.000.000,-**
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur:** Pejabat struktural yang memahami manajemen pemerintahan	
	2. Indikator dan Target Kinerja : Terseleksinya Pejabat Esselon II, terlaksananya pelantikan pejabat Esselon dan Fungsional tertentu, terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS	

Pulau Punjung, Maret 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. YUSRISAL,SKM,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19680324 199003 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs.Andy Sumanto,CfrA	Asril, AP.M.Si	Paryanto,S.Sos,MT	Bobby P.Riza S.STP.Msi
Nip.196812201990091001	Nip.19750225 199501 1 001	Nip.196906091989021001	Nip. 198205212000121002

FORM KAK/TOR

Program	Kepegawaian Daerah	
Sasaran Program	Pejabat Struktural	
Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	
Sub Kegiatan	Asessment Center	
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
	Gambaran Umum	Untuk Mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka (Selter) Asessment atau Uji Kompetensi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
	Uraian Kegiatan	- Pelaksanaan Uji Kompetensi - Pelantikan
Kinerja	Indikator Kinerja	Persentase Penempatan ASN Sesuai Kompetensi
	Batasan Kegiatan	Pejabat Administrator yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
Maksud dan Tujuan	Terdapatnya Pejabat JPT yang memiliki Kompetensi sesuai dengan keahliannya	
Cara pelaksanaan	Pembentukan Tim seleksi terbuka JPT yang terdiri dari Pejabat Internal dan External	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Di luar Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Asessment Center Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM	
Jadwal	Januari s/d Desember 2022	
Biaya	275.000.000,-	

Pulau Punjung, Maret 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. YUSRISAL,SKM,MM

Pembina Tkt I

NIP. 19680324 199003 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Penugasan Prioritas Nasional/Global seperti Pencapaian SDG's

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **Sub Kegiatan :** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Tujuan :** Tersedianya Sarana Penunjang	- Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 memiliki Penduduk sejumlah 227.053 Jiwa. Terdiri Dari Laki-laki 115.023 Jiwa dan Perempuan 112.030 Jiwa. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan terutama untuk anak-anak, ibu hamil dan menyusui. - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus berasaskan : 1. Kepentingan Umum; 2. Kepastian Hukum; 3. Kesamaan Hak; 4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; 5. Keprofesionalan; 6. Partisipasif	**Akses:** Masih timpangnya Pelayanan responsif gender antara laki-laki dan perempuan serta anak-anak **Manfaat :** Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pelayanan terhadap wanita dan anak-anak **Partisipasi:** - Belum tersentuhnya pelayanan yang ramah terhadap perempuan, ibu menyusui dan anak-anak - Belum ada perlakuan khusus terhadap perempuan, ibu menyusui,anak-anak dan penduduk rentan **Kontrol:** -	- Kurangnya anggaran untuk membangun kantor yang representatif - Kurangnya Pemahamanan tentang sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberi prioritas terhadap wanita, anak-anak dan kelompok rentan dalam pelayanan publik	- Terwujudnya fasilitas dan perlakuan khusus bagi wanita, anak-anak dan kelompok rentan dalam pelayanan publik	1. Melakukan Rehab/gedung kantor 2. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan ramah terhadap perempuan, anak-anak dan penduduk rentan	Meningkatnya pelayanan public yang ramah terhadap perempuan, anak-anak dan penduduk rentan	**Out put** Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan, anak-anak dan penduduk rentan **Out come** Terwujudnya Pelayanan yang responsif gender

Pelayanan Administrasi Kependudukan	7. Akuntabilitas 8. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif 9. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi kelompok rentan							

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA

ABDI AMRI, SE
NIP. 19641231 198612 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL, AP. M.Si NIP. 19750225 199501 1 001	Paryanto, S.Sos,M.T NIP 19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="3">Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="3">5.03.02</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="3">Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td>HASIL/OUTPUT</td><td colspan="3">Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan</td></tr>
<tr><td>ANALISA SITUASI</td><td colspan="3">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
- Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 memiliki Penduduk sejumlah 227.053 Jiwa. Terdiri Dari Laki-laki 115.023 Jiwa dan Perempuan 112.030 Jiwa.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan terutama untuk anak-anak, ibu hamil dan menyusui.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus berasaskan :
1. Kepentingan Umum;
2. Kepastian Hukum;
3. Kesamaan Hak;
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif; dan
7. Akuntabilitas.
8. Persamaan Pelakuan/Tidak diskriminatif
9. Perlakuan Khusus bagi kelompok rentan</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
Masih timpangnya Pelayanan responsif gender antara laki-laki dan perempuan serta anak-anak :
b. Penyebab Internal
a) Kurangnya anggaran untuk membangun kantor yang representatif
b) Kurangnya Pemahamanan tentang sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan.Kurangnya Pemahamanan SDM tentang Pengarusutamaan Gender
c. Penyebab Eksternal
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberi prioritas terhadap wanita, anak-anak dan kelompok rentan dalam pelayanan publik</td></tr>
<tr><td rowspan="5">RENCANA AKSI</td><td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td><td colspan="2">Melakukan Rehab/gedung kantor</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Untuk mendapatkan gedung yang representatif</td></tr>
<tr><td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp. 100.000.000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 2</td><td colspan="2">Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan ramah terhadap perempuan, anak-anak dan penduduk rentan</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan, anak-anak dank kelompok rentan</td></tr>
<tr><td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp. 50.000.000</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Anggaran</td><td colspan="2">Rp. 150.000.000</td></tr>
<tr><td>Capaian Program</td><td colspan="3">Out put
Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan, anak-anak dan penduduk rentan
Out come
Terwujudnya Pelayanan yang responsif gender</td></tr>
</table>

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABDI AMRI, SE
NIP. 19641231 198612 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	KepalaBapppeda	Kepala DinasSosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA	ASRIL, AP. M.Si	Paryanto, S.Sos,M.T	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP. 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Latar Belakang	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	Gambaran Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan terutama untuk anak-anak, ibu hamil dan menyusui.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan Melakukan Rehab/gedung kantor dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan ramah terhadap perempuan, anak-anak dan penduduk rentan
	Indikator Kinerja	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana yang ramah terhadap perempuan, anak-anak dan penduduk rentan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatnya pelayanan public yang ramah terhadap perempuan, anak-anak dan penduduk rentan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membangun sarana dan prasarana yang ramah anak dan inu (menyusui)
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangani Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 150.000.000,-

Pulau Punjung ,01 Juni 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABDI AMRI, SE
Pembina Utama Muda/IV. c
NIP. 19641231 198612 1 002

Dipindai dengan CamScanner

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DALAM RANGKA PENCAPAIAN SPM

OPD : Dinas Kesehatan
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Kegiatan Berkaitan dengan : Mengatasi Kesenjangan Gender yang Terkait

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar *(Baseline)***	**Indikator Gender**
Program Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan ***Kegiatan :*** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif ***Tujuan :*** Usia produktif mendapatkan pelayanan	Pelaksanaan kegiatan kesehatan usia produktif sesuai standar dapat dilakukan dengan : 1. Memberikan edukasi kesehatan termasuk KB 2. Pelayanan skrining kesehatan yaitu penyakit menular	• **Akses** : - Posbindu PTM berbasis Peran Serta Masyarakat (PSM) pengupayaan posbindu PTM masih banyak dilakukan oleh perempuan dari pada laki-laki - Pelayanan pandu PTM di FasKes. jumlah kunjungan perempuan	• Keterbatasan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan karena terikat pada juknis PTM tidak melakukan pengobatan tetapi hanya melakukan skrening penyakit menular dan tidak menular,apabila	• Masih Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan usia produktif • Masih kurangnya keterlibatan lintas sector dan lintas program dalam pelaksanaan skrining PTM • Kurangnya	Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan minimal 1x seTahun dengan mengoptimalkan peningkatan kunjungan	• Petugas kesehatan membuat suatu inovasi agar para laki-laki berperan aktif dalam pelaksanaan skrening kesehatan. • Meningkatkan sosialisasi pada keluarga dan masyarakat terhadap pelaksanaan PTM	**Jumlah sasaran usia produktif** Usia produktif (15-64 Tahun) laki-laki : 97.408 orang perempuan : 88.900 orang Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan	**Output** Meningkatkan kunjungan usia produktif kesehatannya terpantau secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan. Tersedianya Anggaran di tahun 2022 Rp.25.000.000,-

kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan minimal 1x seTahun dengan mengoptimalkan peningkatan kunjungan laki-laki untuk cek kesehatan secara berkala.	maupun penyakit tidak menular Melalui (PTM) kegiatan PTM : - Pengukuran TB,BB dan lingkar perut - Pengukuran TD,gula darah dan - Melakukan anamnesa perilaku resiko **Jumlah sasaran usia produktif** Usia produktif (15-64 Tahun) laki-laki : 97.408 orang perempuan : 88.900 orang Jumlah kunjungan	lebih tinggi dari pada laki-laki - Pelayanan KB di FasKes jumlah kunjungan perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki • **Partisipasi :** - Masih rendahnya kesadaran laki-laki untuk melakukan skrining kesehatan secara berkala - Masih rendahnya kesdaran laki-laki mau berKB • **Control :** - Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif dilaksanakan 2x setahun	memerlukan pelayanan khusus maka pasien dirujuk ke FasKes. • Kegiatan program menoton sehingga dapat menimbulkan kurang minat para kaum laki-laki untuk melakukan skrening kesehatan.	kunjungan laki-laki untuk melakukan skrining kesehatan salah satunya dipengaruhi oleh peran pemenuhan ekonomi keluarga. • Masih ada laki-laki beranggapan pengaturan jarak kehamilan sepenuhnya berada pada perempuan	laki-laki untuk cek kesehatan secara berkala.	• Membuat MoU perjanjian kerjasama pada lintas sector dan lintas program terhadap pelaksanaan PTM • Meningkatkan pelayanan kesehatan skrening PTM di tempat kerja dan di tempat umum sehingga peningkatan motivasi laki-laki untuk melakukanskrening kesehatan. • Meningkatkan KIE pada pasangan usia subur	pada usia produktif laki-laki : 49.444 orang atau (54.5%) perempuan : 70.216 orang (84.8%) **Jumlah sasaran peserta KB** PUS : 50.089 orang Jumlah kunjungan pelayanan peserta KB aktif. laki-laki : 2039 orang perempuan : 31.847 orang	**Outcome :** Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

	pelayanan kesehatan pada usia produktif laki-laki : 49.444 orang atau (54.5%) perempuan : 70.216 orang (84.8%) **Jumlah sasaran peserta KB** PUS : 50.089 orang Jumlah kunjungan pelayanan peserta KB aktif. laki-laki : 2039 orang perempuan : 31.847 orang	pada tiap Nagari di wilayah kerja puskesmas se-Kab.Dharmasraya - Pelayanan kesehatan KB dapat dilakukan di FasKes - . • **Manfaat** Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Kesehatan

dr.Pom Harry Satria,Sp.OG (K)
NIP.19701011 200212 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Asril, AP, M. Si NIP 19650225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001	Bobby P.Riza, S .STP, M, SI NIP 19820521 200012 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
Jl. Pasengerahan No 17 ☎ (0754) 40850, Fax (0754) 40850 Sungai Dareh

PULAU PUNJUNG (27673)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER ***(GENDER BUDGET STATEMENT)*** **SKPD**	**: DINAS KESEHATAN**
TAHUN ANGGARAN	**: *2023***
PROGRAM	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
KODE PROGRAM	1 02 02 2.02 06
KEGIATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
HASIL/OUTPUT	Meningkatkan kunjungan usia produktif kesehatannya terpantau secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.
ANALISIS SITUASI	**3. Data Pembuka Wawasan** Pelaksanaan kegiatan kesehatan usia produktif sesuai standar dapat dilakukan dengan : 1. Memberikan edukasi kesehatan termasuk KB 2. Pelayanan skrining kesehatan yaitu penyakit menular maupun penyakit tidak menular Melalui (PTM) kegiatan PTM : - Pengukuran TB,BB dan lingkar perut - Pengukuran TD,gula darah dan - Melakukan anamnesa perilaku resiko **Jumlah sasaran usia produktif** Usia produktif (15-64 Tahun) laki-laki : 97.408 orang perempuan : 88.900 orang Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan pada usia produktif laki-laki : 49.444 orang atau (54.5%) perempuan : 70.216 orang (84.8%) **Jumlah sasaran peserta KB** PUS : 50.089 orang Jumlah kunjungan pelayanan peserta KB aktif. laki-laki : 2039 orang perempuan : 31.847 orang

	4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Internal **Akses** : - Posbindu PTM berbasis Peran Serta Masyarakat (PSM) pengupayaan posbindu PTM masih banyak dilakukan oleh perempuan dari pada laki-laki - Pelayanan pandu PTM di FasKes. jumlah kunjungan perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki - Pelayanan KB di FasKes jumlah kunjungan perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki **Partisipasi :** - Masih rendahnya kesadaran laki-laki untuk melakukan skrining kesehatan secara berkala - Masih rendahnya kesdaran laki-laki mau berKB **Control :** - Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan usia produktif dilaksanakan 2x setahun pada tiap Nagari di wilayah kerja puskesmas se-Kab.Dharmasraya Pelayanan kesehatan KB dapat dilakukan di FasKes **Manfaat** Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar b. Penyebab Internal - Keterbatasan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan karena terikat pada juknis PTM tidak melakukan pengobatan tetapi hanya melakukan skrening penyakit menular dan tidak menular,apabila memerlukan pelayanan khusus maka pasien dirujuk ke FasKes. - Kegiatan program menoton sehingga dapat menimbulkan kurang minat para kaum laki-laki untuk melakukan skrening kesehatan **c.** Penyebab Eksternal • Masih Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan usia produktif • Masih kurangnya keterlibatan lintas sector dan lintas program dalam pelaksanaan skrining PTM • Kurangnya kunjungan laki-laki untuk melakukan skrining kesehatan salah satunya dipengaruhi oleh peran pemenuhan ekonomi keluarga. • Masih ada laki-laki beranggapan pengaturan jarak kehamilan sepenuhnya berada pada perempuan	
RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas**	• Petugas kesehatan membuat suatu inovasi agar para laki-laki berperan aktif dalam pelaksanaan skrening kesehatan. • Meningkatkan sosialisasi pada keluarga dan masyarakat terhadap pelaksanaan PTM

		• Membuat MoU perjanjian kerjasama pada lintas sector dan lintas program terhadap pelaksanaan PTM • Meningkatkan pelayanan kesehatan skrening PTM di tempat kerja dan di tempat umum sehingga peningkatan motivasi laki-laki untuk melakukan skrening kesehatan. • Meningkatkan KIE pada pasangan usia subur	
		Tujuan	Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk kegiatan edukasi dan skrining kesehatan minimal 1x seTahun dengan mengoptimalkan peningkatan kunjungan laki-laki untuk cek kesehatan secara berkala
		Alokasi Anggaran	Rp.25.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	**Output :** Meningkatkan kunjungan usia produktif kesehatannya terpantau secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan. **Outcome :** Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

Pulau Punjung, Maret 2022

Kepala,

dr. Pom Harry Satria, Sp.OG (K)

NIP. 19701011 200212 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA	Asril, AP, M. SI	Paryanto, S. Sos, M.T	Bobby P Riza, S .STP, M, SI
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
Sasaran Program		Laki-laki dan perempuan usia produktif (15-64 Tahun) dan Pasangan Usia Subur (PUS)
Kegiatan		Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif
Sub Kegiatan		Pelaksanaan skrening kesehatan, pelayanan KB
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri no 9 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas 2. Perbub PUG
	Gambaran Umum	Meningkatkan kunjungan usia produktif untuk cek kesehatan sehingga kesehatannya terpantau secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Memberikan edukasi kesehatan termasuk KB 2. Pelayanan skrining kesehatan yaitu penyakit tidak menular melalui kegiatan PTM : - Pengukuran TB,BB dan lingkar perut - Pengukuran TD,gula darah dan - Melakukan anamnesa perilaku resiko
	Indikator Kinerja	Meningkatkan kunjungan skrening kesehatan pada masyarakat usia produktif
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan skrening penyakit tidak menular dan pelayanan KB
Maksud dan Tujuan		Usia produktif laki-laki dan perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan minimal 1x seTahun dengan mengoptimalkan peningkatan kunjungan laki-laki untuk cek kesehatan secara berkala.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pelaksanaan Posbindu PTM, Germas zon, memberikan pelayanan KB pada PUS
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Di wilayah kerja UPT Puskesmas Se-Kabupaten Dharmasraya

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan, pelaksana Kabid dan sub.koordinator di bidan kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya	Rp. 25.000.000,-,-

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Kesehatan

dr.Pom Harry Satria Sp.OG (K)
NIP.19701011 200212 1 003

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DALAM RANGKA PENCAPAIAN SPM

OPD : Dinas Kesehatan
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kegiatan Berkaitan dengan : Mengatasi Kesenjangan Gender yang Terkait

Langkah 1	**Langkah 2**	**Langkah 3**	**Langkah 4**	**Langkah 5**	**Langkah 6**	**Langkah 7**	**Langkah 8**	**Langkah 9**
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar *(Baseline)***	**Indikator Gender**
Program Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan ***Kegiatan :*** Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu hamil ***Tujuan :*** Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dapat	Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin	• **Akses** : - Masih rendahnya kunjungan ibu hamil didampingi oleh suami dalam memberikan pelayanan ANC berkualitas. - Masih rendahnya peran serta suami saat kegiatan kelas ibu hamil pelaksanaanny	• Petugas kesehatan belum optimal berperan dan berinovasi untuk peningkatan kunjungan ibu hamil beserta suami • Pemanfaatan P4K masih belum optimal	• Masih Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil • Kurangnya partisipasi suami ibu hamil pada pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil • Masih kurangnya	• Melibatkan peran suami ibu hamil sehingga terciptanya suami SIAGA (suami siap siaga) pada ibu hamil,bersalin dan nifas.	• Petugas kesehatan membuat suatu inovasi agar para suami ibu hamil berperan aktif dalam pemeliharan kesehatan ibu hamil • Revitalisasi dan mengoptimalkan P4K pada lintas	***Jumlah sasaran*** ibu hamil 5.979 orang ***Kegiatannya*** - Ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan selama hamil minimal 4x kunjungan - Pelaksanaan posyandu Balita 1 x sebulan dan kegiatan - Kelompok kelas ibu	**Output :** Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilaksanakan secara berkualitas dengan menciptakan suami SIAGA Tersedianya Anggaran di tahun 2022 Rp.40.000.000,-

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar *(Baseline)***	**Indikator Gender**
menerima pelayanan kesehatan sesuai standar dan mencegah AKI dan AKB	dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan upaya promotif dan preventif di puskesmas termasuk peran lintas sektor dan lintas program yang ada di wilayah kerja puskesmas se-kabupaten dharmasraya. ***jumlah sasaran*** ibu hamil 5.979 orang ***Kegiatannya*** adalah	a mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan,bersalin lancar dan memberikan pengetahuan dasar tentang kesehatan bayi. • **Partisipasi :** Sikap dan perilaku suami belum terpenuhi untuk mendukung psikologis dan kesehatan ibu selama hamil sampai hari melahirkan • **Control :** - Ibu hamil melakukan		peran lintas sector dan kelurga pada penerapan P4K.		sector dan keluarga ibu hamil • Melibatkan suami ibu hamil pada pertemuan kelas ibu hamil	hamil 3x pertemuan selama hamil. Kunjungan ibu hamil di tahun 2021 yaitu K1 = 4.115 (68.8%) K4 = 3.505 (56.6%)	**Outcome :** Ibu hamil dapat menerima pelayanan kesehatan Antenatal Care sesuai standar dan mencegah AKI dan AKB

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar *(Baseline)***	**Indikator Gender**
	kunjungan luar gedung seperti Posyandu,kelas ibu balita dan kunjungan dalam gedung pemeriksaan ANC berkualitas. Jumlah kunjungan ibu hamil di tahun 2021 yaitu K1 = 4.115 (68.8%) K4 = 3.505 (56.6%)	pemeriksaan kehamilan selama hamil minimal 4x kunjungan - Pelaksanaan posyandu Balita 1 x sebulan dan kegiatan - Kelompok kelas ibu hamil 3x pertemuan selama hamil. • **Manfaat** ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar *(Baseline)***	**Indikator Gender**
		sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat.						

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Kesehatan

dr.Pom Harry Satria,Sp.OG (K)
NIP. 19701011 200212 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Astril, AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	Bobby P.Riza, S .STP, M, SI NIP 19820521 200012 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
Jl. Pasengerahan No 17 ☎ (0754) 40850, Fax (0754) 40850 Sungai Dareh

PULAU PUNJUNG (27673)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(*GENDER BUDGET STATEMENT*)

SKPD : **DINAS KESEHATAN**

TAHUN ANGGARAN : ***2023***

PROGRAM	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
KODE PROGRAM	1 02 02 2.02 01
KEGIATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu hamil
HASIL/OUTPUT	Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilaksanakan secara berkualitas dengan menciptakan suami SIAGA (Siap Antar Jaga)
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan upaya promotif dan preventif di puskesmas termasuk peran lintas sektor dan lintas program yang ada di wilayah kerja puskesmas se-kabupaten dharmasraya. ***jumlah sasaran*** ibu hamil 5.979 orang ***Kegiatannya*** adalah kunjungan luar gedung seperti Posyandu,kelas ibu balita dan kunjungan dalam gedung pemeriksaan ANC berkualitas. Ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui Jumlah kunjungan ibu hamil di tahun 2021 yaitu K1 = 4.115 (68.8%) K4 = 3.505 (56.6%) **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Faktor Kesenjangan Internal **Akses** : - Masih rendahnya kunjungan ibu hamil didampingi oleh suami

	dalam memberikan pelayanan ANC berkualitas. - Masih rendahnya peran serta suami saat kegiatan kelas ibu hamil pelaksanaannya mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan,bersalin lancar dan memberikan pengetahuan dasar tentang kesehatan bayi. **Partisipasi :** Sikap dan perilaku suami belum terpenuhi untuk mendukung psikologis dan kesehatan ibu selama hamil sampai hari melahirkan **Control :** - Ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan selama hamil minimal 4x kunjungan - Pelaksanaan posyandu Balita 1 x sebulan dan kegiatan Kelompok kelas ibu hamil 3x pertemuan selama hamil **Manfaat** Ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat. b. Penyebab Internal - Petugas kesehatan belum optimal berperan dan berinovasi untuk peningkatan kunjungan ibu hamil beserta suami - Pemanfaatan P4K masih belum optimal **c.** Penyebab Eksternal - Masih Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil - Kurangnya partisipasi suami ibu hamil pada pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil - Masih kurangnya peran lintas sector dan kelurga pada penerapan P4K.	
RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas**	• Petugas kesehatan membuat suatu inovasi agar para suami ibu hamil berperan aktif dalam pemeliharan kesehatan ibu hamil • Revitalisasi dan mengoptimalkan P4K pada lintas sector dan keluarga ibu hamil

		• Melibatkan suami ibu hamil pada pertemuan kelas ibu hamil	
		Tujuan	Melibatkan peran suami ibu hamil sehingga terciptanya suami SIAGA (suami siap siaga) pada ibu hamil,bersalin dan nifas.
		Alokasi Anggaran	Rp.40.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	**Output :** Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilaksanakan secara berkualitas dengan menciptakan suami SIAGA **Outcome :** Ibu hamil dapat menerima pelayanan kesehatan Antenatal Care sesuai standar dan mencegah AKI dan AKB		

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala,

dr.Pom Harry Satria,Sp.OG.(K)
NIP.19701011 200212 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA	Asril, AP, M. Si	Paryanto, S. Sos, M.T	Bobby P.Riza, S .STP, M, SI
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750220 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
Sasaran Program		Ibu hamil. di lingkup dinas kesehatan
Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Sub Kegiatan		Pelayanan Ante Natal Care, ibu bersalin ibu nifas dan ibu menyusui
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri no 9 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas
	Gambaran Umum	Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan ANC berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan yang sehat, bersalin dengan selamat, melahirkan bayi yang sehat dengan menciptakan suami SIAGA
Kegiatan	Uraian Kegiatan	• Petugas kesehatan membuat suatu inovasi agar para suami ibu hamil berperan aktif dalam pemeliharaan kesehatan ibu hamil • Revitalisasi dan mengoptimalkan P4K pada lintas sector dan keluarga ibu hamil • Melibatkan suami ibu hamil pada pertemuan kelas ibu hamil
	Indikator Kinerja	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Batasan Kegiatan	Melaksanakan Pelayanan kesehatan pada ibu hamil (ANC), ibu bersalin ibu nifas dan ibu menyusui
Maksud dan Tujuan		Ibu hamil, bersalin dan ibu nifas dapat menerima pelayanan kesehatan sesuai standar peran suami sangat mempengaruhi penurunan AKI, AKB dan AKABA
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Kunjungan luar gedung seperti Posyandu,kelas ibu balita dan kunjungan dalam gedung sepertu pemeriksaan ANC berkualitas. Ibu bersalin, ibu nifas dan ibu menyusui.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Di wilayah kerja UPT Puskesmas Se-Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan, pelaksana Kabid dan sub.koordinator kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya	Rp. 40.000.000,-

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Kesehatan

dr.Pom Harry Satria,Sp.OG (K)
NIP.19701011 200212 1 003

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

PROGRAM : **Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan **Kegiatan** Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota **Sub Kegiatan :** Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota **Tujuan :** Meningkatkan Kapasitas organisasi perempuan dan lembaga pemberdayaan perempuan	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Data tahun 2022 Jumlah organiasasi perempuan : 17 Yang aktif : 17 Yang tidak aktif : 0	**Akses :** Masih kurangnya sarana informasi (surat undangan tidak samapai ke organisasi yang bersangkutan/ kesibukan) **Partisipasi :** Belum optimalnya partisipasi organisasi perempuan dalam kegiatan (seperti bimtek) **Kontrol :** Masih kurangnya pengawasan dari pengurus organisasi terhadap anggotanya yang ikut **Manfaat :** -	Kurangnya pemahaman SDM perencana baik dari segi kualitas Kurangnya sarana informasi Kurangnya pembinaan, sosialisasi terhadap perempuan	Masih belum optimalnya partisipasi organisasi perempuan Rendahnya eksistensi dalam mengelola organisasi perempuan dalam hal manajemen	Meningkatkan Kapasitas organisasi perempuan dan lembaga pemberdayaan perempuan	1. Pembinaan dan koordinasi serta temu teknis/ rakor (2 hari) 2. Pengadaan sarana informasi berupa leaflet tentang manajemen orang perempuan	Jumlah orgasasi perempuan : 17 Yang aktif : 17 Yang tidak aktif : 0	**Input :** Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM jaringan organisasi perempuan Sebanyak 50 orang Anggaran 550.000.000 **Output :** Meningkatnya kapasitas dan eksistensi organisasi perempuan **Out Come :** Meningkatkan SDM jaringan organisasi perempuan

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINSOSP3APPKB
KABUPATEN DHARMASRAYA

BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3 APPKB
Drs. ANDY SUMANTO, CfrA	ASRIL, AP.M.Si	PARYANTO, S. Sos, M.T	BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

PROGRAM	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
KODE PROGRAM	**2.08.02**		
KEGIATAN	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
HASIL/ OUTPUT	Meningkatnya kapasitas dan eksistensi organiasasi perempuan		
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Data tahun 2022 Jumlah Organisasi Perempuan : 17 Yang aktif : 17 Yang tidak aktif : 0		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** - Masih kurangnya sarana informasi (surat undangan tidak sampai ke organisasi yang bersangkutan/ kesibukan) - Belum optimalnya partisipasi organisasi perempuan dalam kegiatan (seperti bimtek) - Masih kurangnya pengawasan dari pengurus organisasi terhadap anggotanya yang ikut **b. Penyebab Internal** - Kurangnya pemahaman SDM perencana baik dari segi kualitas - Kurangnya sarana informasi - Kurangnya pembinaan, sosialisasi terhadap perempuan **c. Penyebab Eksternal** - Masih belum optimalnya partisipasi organisasi perempuan - Rendahnya eksistensi dalam mengelola organisasi perempuan dalam hal manajemen		
RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**	Pembinaan dan koordinasi serta temu teknis/ rakor (2 hari)	
		Tujuan	Terlaksananya kapasitas dan eksistensi organisasi perempuan
		Alokasi Anggaran	400.000.000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Pengadaan sarana informasi berupa leaflet tentang manajemen perempuan	
		Tujuan	Terlaksananya kapasitas dan eksistensi organisasi perempuan
		Alokasi Anggaran	50.000.000
	Total Anggaran	**550.000.000,-**	
Capaian Program	**Out put** Meningkatnya kapasitas dan eksistensi organisasi perempuan **Out come** Peningkatan SDM jaringan organisasi perempuan		

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINSOSP3APPKB,
KABUPATEN DHARMASRAYA

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3 APPKB
Drs. ANDY SUMANTO, CfrA	ASRIL, AP.M.Si	PARYANTO, S. Sos, M.T	BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si
NIP.19681220 199009 1 001	NIP. 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sasaran Program		Kepala OPD, Instansi Vertikal, Anggota Forkomda PMP3A
Kegiatan		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan		Advokasi kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
	Gambaran Umum	Jumlah Organisasi Perempuan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 sebanyak 21 yang aktif sebanyak 15 dan yang tidak aktif sebanyak 6
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan dan koordinasi serta temu teknis / rakor (2 hari) Pengadaan sarana informasi berupa leaflet tentang manajemen perempuan
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM jaringan organisasi perempuan sebanyak 50 orang
	Batasan Kegiatan	Rakor, temu teknis
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dan lembaga pemberdayaan perempuan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui diskusi, pemaparan, tanya jawab
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota Penanggung Jawab : Kepala Dinas SOSP3APPKAB
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 550.000.000

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINSOSP3APPKB,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

PROGRAM : **Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan **Kegiatan** Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota **Sub Kegiatan :** Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota **Tujuan :** Meningkatkan pemahaman OPD dan Forkamda tentang PUG dan PPRG	- Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Perbub No 5 tahun 2020 Data tahun 2022 - Jumlah OPD : 38 - Jumlah kepala OPD : 38 - Laki-laki : 36 - Perempuan : 2 Jumlah FP : 43 Laki- laki : 14 Perempuan : 29 Jumlah FP yang sudah bersertifikat : Laki- laki : 14 Perempuan : 29	**Akses :** Masih kurangnya sarana informasi tentang PUG dan PPRG (Kurangnya Leaflet, KIE, Brosur). **Partisipasi :** Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pelatihan/ sosialisasi tentang PUG dan PPRG (lihat semua data pada langkah 2 banyak mana laki- laki dan perempuan). **Kontrol :** Masih kurangnya kontrol pengambil kebijakan/ pengawasan terhadap kegiatan PUG/ PPRG **Manfaat :** Proporsi Perempuan lebih rendah dari pada laki- laki dalam kegiatan PUG/ PPRG	- Tidak semua pengambil kebijakan dan perencana pada OPD, Instansi Vertikal memahami konsep PUG/PPRG - Masih kurangnya Kompetensi perencana tentang PUG dan PPRG - Belum optimalnya koordinasi dengan OPD dan lintas sektor	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan instansi vertikal tentang PUG dan PPRG	Meningkatkan Pemahaman (laki-laki dan perempuan) OPD dan instansi vertikal tentang PUG dan PPRG	1. Meningkatkan koordinasi, promosi dan advokasi dengan OPD dan lintas sektor 2. Pelatihan/ Bimtek peningkatan kapasitas SDM perencana	Data tahun 2022 - Jumlah OPD : 38 - Jumlah kepala OPD : 38 - Laki- laki : 36 - Perempuan : 2 Jumlah FP : 43 Laki- laki : 14 Perempuan : 29 Jumlah FP yang sudah bersertifikat : Laki- laki : 14 Perempuan : 29	**Input :** - Terlaksananya Promosi advokasi PUG sebanyak 70 orang serta pelatihan PPRG Sebanyak 60 orang - Anggaran : 57.127.350,- **Output :** Meningkatnya pemahaman OPD dan lintas sektor tentang PUG dan PPRG **Out Come :** Meningkatnya pemahaman OPD, instansi vertikal tentang PUG dan PPRG

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINSOSP3APPKB
KABUPATEN DHARMASRAYA

BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3 APPKB
Drs. ANDY SUMANTO, CfrA	ASRIL, AP.M.Si	PARYANTO, S. Sos, M.T	BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="3">Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="3">2.08.02</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="3">Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</td></tr>
<tr><td>HASIL/ OUTPUT</td><td colspan="3">Meningkatnya pemahaman OPD dan lintas sektor tentang PUG PPRG</td></tr>
<tr><td>ANALISA SITUASI</td><td colspan="3">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
Data tahun 2022
- Jumlah kepala OPD : 38
- Laki- laki : 36
- Perempuan : 2
Jumlah FP : 43
Laki- laki : 14
Perempuan : 29

Jumlah FP yang sudah bersertifikat :
Laki- laki : 14
Perempuan : 29</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pelatihan/ sosialisasi tantang PUG dan PPRG (lihat semua data pada langkah 2 banyak mana laki- laki dan perempuan)
b. Penyebab Internal
- Tidak semua pengambil kebijakan dan perencana pada OPD, Instansi Vertikal memahami konsep PUG/ PPRG
- Masih kurangnya kompetensi perencana tentang PUG dan PPRG
c. Penyebab Eksternal
Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan instansi vertikal tentang PUG dan PPRG</td></tr>
<tr><td>RENCANA AKSI</td><td>Komponen/ Aktifitas 1</td><td colspan="2">Koordinasi, promosi dan advokasi dengan OPD dan lintas sektor tentang PUG PPRG</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tujuan</td><td>Meningkatkan pemahaman OPD dan lintas sektor tentang PUG dan PPRG</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp 29.127.350,-</td></tr>
<tr><td></td><td>Komponen/ Aktifitas 2</td><td colspan="2">Pelatihan/ Bimtek peningkatan kapasitas SDM perencana</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tujuan</td><td>Meningkatkan kapasitas SDM perencana</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Alokasi Anggaran</td><td>28.000.000,-</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Anggaran</td><td colspan="2">Rp 57.127.350,-</td></tr>
<tr><td>Capaian Program</td><td colspan="3">Out put
Meningkatnya pemahaman OPD dan lintas sektor tentang PUG PPRG

Out come
Meningkatnya pemahaman OPD, instansi vertikal tentang PUG PPRG</td></tr>
</table>

Pulau Punjung, Maret 2022

KEPALA DINSOSP3APPKB,
KABUPATEN DHARMASRAYA

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3 APPKB
Drs. ANDY SUMANTO, CfrA	ASRIL, AP.M.Si	PARYANTO, S. Sos, M.T	BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si
NIP. 19681220 199009 1 001	NIP. 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP. 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Sasaran Program		Kepala OPD, Instansi Vertikal
Kegiatan		Promosi, advokasi, pelatihan
Sub Kegiatan		Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri no 67 tahun 2011 2. Peremn pppa no 4 th 2014 3. Impres no 9 th 2000 4. Perbub PUG 5. Stranas PUG
	Gambaran Umum	Dikab DM dari sekian OPD, Instansi vertikal tergabung mempunyai 38 OPD, 2 Instansi Vertikal. Untuk tercapainya KKG maka perlu dilakukan promosi, advokasi dan pelatihan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Promosi, advokasi, pelatihan
	Indikator Kinerja	Meningkatkan IPG Meningkatkan IDG
	Batasan Kegiatan	Pada kegiatan promosi dibahas tentang review PUG, isu gender Pada kegiatan pelatihan membahas tentang penyusunan GAP GBS TOR PRA RKA
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan pemahaman OPD dan Forkomda tentang PUG dan PPRG
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui diskusi, pemaparan, tanya jawab
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/ Kota Penanggung Jawab : Kepala Dinas SOSP3APPKAB
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 57.127.350,-

Pulau Punjung, Maret 2022

KEPALA DINSOSP3APPKB,
KABUPATEN DHARMASRAYA

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

MENGATASI KESENJANGAN GENDER

OPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

PROGRAM : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Faktor Kesenjangan**	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Basis Data (Base-Line)**	**Indikator Kinerja**
Program : Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan **Kegiatan** : Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi **Tujuan** : Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi	Dalam Kegiatan Kejuaraan Olahraga baik ditingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional sebagian besar atletnya didominasi oleh laki-laki. Terbukti pada perhelatan PON XX Papua, Terdapat total 7.039 atlet yang bersaing memperebutkan medali di PON Papua. Jumlah ini terdiri atas **4.161 atlet laki-laki** dan **2.878 atlet perempuan** sehingga rasio atlet laki-laki dan perempuan adalah **2 : 1**. Sedangkan jumlah atlet Kabupaten Dharmasraya yang dikirim ke ajang tersebut sebanyak **8**	- **Akses** : Beberapa Cabor hanya diperuntukkan untuk atlet laki-laki - **Partisipasi** : Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya atlet Perempuan dalam mengikuti kejuaraan olahraga - **Kontrol** : Belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait keikutsertaan atlet perempuan dalam kejuaraan	- Pelaksanaan kegiatan Olahrga belum responsive gender - Kuranganya Cabang Olahraga yang bisa di ikuti perempuan - Dukungan peralatan dan perlengkapan Olahraga yang belum merata.	- Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam Berolahraga - Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Pengembangan Olahraga dan Hanya Bergantung Pada Pemerintah	- Meningkatkan peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional	- Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten Kota yang responsive gender - Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	- Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapai : 25 cabor - Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi : 23 cabor - Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional : 5 Cabor - Jumlah pelatih bersertifikat : 5 Orang	**Output :** Jumlah Atlet dan Cabang olahraga yang berprestasi ditingkat Provinsi dan Nasional (yang responsive gender). **Outcome :** Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi (yang responsive gender)

	Orang yang mana hanya terdapat **1 atlet perempuan** saja yang terpilih. Ini membuktikan bahwa kurangnya minat dan juga partisipasi para atlet perempuan.	**- Manfaat : -**						

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda, dan Olahraga

H. ST. M TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPPEDA	KEPALA DINSOSP3APPKB
Drs.ANDY SUMANTO,CFrA	**ASRIL, AP. M.Si**	**PARYANTO,S.Sos.,MT**	**BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si**
NIP.19681220 199009 1 001	**NIP. 19750225 199501 1 001**	**NIP19690609 198902 1 001**	**NIP 19820521 200012 1 002**

P ERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD	**:** ***DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA***
TAHUN ANGGARAN	**:** ***2022***
PROGRAM	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
KODE PROGRAM	2.19.03
KEGIATAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).** Dalam Kegiatan Kejuaraan Olahraga baik ditingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional sebagian besar atletnya didominasi oleh laki-laki. Terbukti pada perhelatan PON XX Papua, Terdapat total 7.039 atlet yang bersaing memperebutkan medali di PON Papua. Jumlah ini terdiri atas **4.161 atlet laki-laki** dan **2.878 atlet perempuan** sehingga rasio atlet laki-laki dan perempuan adalah **2 : 1**. Sedangkan jumlah atlet Kabupaten Dharmasraya yang dikirim ke ajang tersebut sebanyak **8 Orang** yang mana hanya terdapat **1 atlet perempuan** saja yang terpilih. Ini membuktikan bahwa kurangnya minat dan juga partisipasi para atlet perempuan. **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** - **Akses** : Beberapa Cabor hanya diperuntukkan untuk atlet laki-laki - **Partisipasi** : Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya atlet Perempuan dalam mengikuti kejuaraan olahraga - **Kontrol** : Belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait keikutsertaan atlet perempuan dalam kejuaraan - **Manfaat : -**
CAPAIAN KEGIATAN	**Tolok Ukur** Meningkatkan peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional.
	Indikator dan Target Kinerja **Output :** Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi ditingkat Provinsi dan Nasional (yang responsive gender). **Outcome :** Tumbuhnya Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional

RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan 1**	**Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender**	
		Masukan	Rp 500.000.000,-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Terlaksananya Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender
	Sub Kegiatan 2	**Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten Kota yang responsive gender**	
		Masukan	Rp 250.000.000,-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten Kota yang responsive gender
	Sub Kegiatan 3	**Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota**	
		Masukan	Rp 500.000.000
		Keluaran	3 Macam (Emas, Perak, Perunggu)
		Hasil	Tersedianya Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
	Total anggaran		Rp 1.250.000.000,-

Pulau Punjung, 28 Maret 2022

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

H. ST. M.TAUFIK, SE. MM

NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPPEDA	KEPALA DINSOSP3APPKB
Drs.ANDY SUMANTO,CFrA	**ASRIL, AP. M.Si**	**PARYANTO,S.Sos.,MT**	**BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si**
NIP.19681220 199009 1 001	**NIP. 19750225 199501 1 001**	**NIP19690609 198902 1 001**	**NIP 19820521 200012 1 002**

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Sasaran Program		Kepala OPD, Masyarakat
Kegiatan		Pembinaan dan Pengembangan Rekreasi
Sub Kegiatan		Penyediaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri no 67 tahun 2011 2. Peremn pppa no 4 th 2014 3. Impres no 9 th 2000 4. Perbub PUG 5. Stranas PUG
	Gambaran Umum	Dalam Kegiatan Kejuaraan Olahraga sebagian besar atletnya didominasi oleh laki-laki. Terbukti pada perhelatan PON XX Papua, jumlah atlet Kabupaten Dharmasraya yang dikirim ke ajang tersebut sebanyak 8 Orang yang mana hanya terdapat 1 atlet perempuan saja yang terpilih. Ini membuktikan bahwa kurangnya minat dan juga partisipasi para atlet perempuan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pemilihan, Pembinaan dan Pengembangan serta Penghargaan para atlet olahraga.
	Indikator Kinerja	Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi ditingkat Provinsi dan Nasional (yang responsive gender).
	Batasan Kegiatan	Pada sub kegiatan pemilihan dan seleksi atlet daerah, pemilihan atlet dilaksanakan dengan partisipasi yang setara antara atlet perempuan dan laki-laki. Pada sub kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten kota, yang menjadi sasaran utama adalah pembinaan dan pengembangan para atlet secara responsive gender Pada sub Kegiatan pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota pada olahraga yang telah diresponsive gender-kan.
Maksud dan Tujuan		Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui seleksi dan pembinaan serta pengembangan atlet
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Bidang Pemuda dan Olahraga Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 1.250.000.000 ,-

Pulau Punjung, 28 Maret 2022

KEPALA DISBUDPARPORA,
KABUPATEN DHARMASRAYA

H. ST. M TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

service delivery.

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise delivery)

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup **Kegiatan :** Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim **Tujuan :** Pembentukan Kampung Iklim	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan setiap tahunnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim dan Surat Edaran Gubernur Sumatera barat nomor 660/206/TL/DLH-2022 Perihal Pengusulan Lokasi Proklim Tahun 2022 Jumlah Kelompok (Kelompok tani dan kelompok wanita tani) yang dibina dalam upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim tahun 2022 di Nagari Sialang gaung Kec. Koto Baru Dalam satu Nagari terdapat 6 jorong yang terdiri dari 6 Kelompok Wanita Tani (1 kelompok 25-30	**Akses:** Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim **Partisipasi:** Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki **Manfaat :** Meningkatnya pemahaman pengarusutamaan gender dalam kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	• Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender • Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Kurangnya Pemahamanan SDM tentang Pengarusutamaan Gender	• Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim • Koordinasi lintas sector yang masi belum optimal	Bertambah jumlah kelompok peran serta masyarakat yang setara antara laki-laki dan perempuan (responsif gender) dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Sosialisasi tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang responsive gender 2. Pembinaan kelompok yang melakukan upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani) 3. Pemberian Penghargaan Terhadap Nagari yang dibentuk Kampun Iklim	Meningkatnya Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dari 25% menjadi 100% untuk kelompok laki-laki dan 67 % menjadi 100% untuk kelompok perempuan.	**Out put** Terbentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan yang responsif gender **Out come** Terbentuknya Kampung Iklim baru

	orang perempuan) dan 4 Kelompok Tani (25-30 orang laki-laki) , dari 4 Kelompok Tani yang dibina hanya 1 kelompok yang berperan aktif (25%) sedangkan 6 Kelompok Wanita Tani yang dibina hampir mencapai 67% (4 KWT yang berperan aktif)							

Sikabau, 30 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

(Silaturrahim, S.K.M., M.H)
NIP. 19790330 200604 2 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA	ASRIL AP.,M.Si	H. PARYANTO, S.Sos, M.T	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(PernyataanAnggaran Gender)

SKPD : **Dinas Lingkungan Hidup**
TAHUN ANGGARAN : **2023**

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="3">Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="3">2.11.03</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="3">Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</td></tr>
<tr><td>HASIL/OUTPUT</td><td colspan="3">Bertambah jumlah kelompok peran serta masyarakat yang setara antara laki-laki dan perempuan (responsif gender) dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</td></tr>
<tr><td>ANALISA SITUASI</td><td colspan="3">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
Dalam satu Nagari terdapat 6 jorong yang terdiri dari 6 Kelompok Wanita Tani (1 kelompok 25-30 orang perempuan) dan 4 Kelompok Tani (25-30 orang laki-laki) , dari 4 Kelompok Tani yang dibina hanya 1 kelompok yang berperan aktif (25%) sedangkan 6 Kelompok Wanita Tani yang dibina hampir mencapai 67% (4 KWT yang berperan aktif)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
a) Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
b) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki
b. Penyebab Internal
a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender
b) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
c) Kurangnya Pemahamanan SDM tentang Pengarusutamaan Gender
c. Penyebab Eksternal
a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim
b) Koordinasi lintas sector yang masi belum optimal</td></tr>
<tr><td rowspan="5">RENCANA AKSI</td><td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td><td colspan="2">Sosialisasi tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang responsive gender</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Untuk mengetahui pemahaman tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang responsive gender</td></tr>
<tr><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 2</td><td colspan="2">Pemberian Penghargaan Terhadap Nagari yang dibentuk Kampung Iklim</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Agar termotivasi Nagari untuk mengikuti kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</td></tr>
<tr><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Total Anggaran</td><td colspan="2">147.917.400</td></tr>
</table>

Capaian Program	**Out put** Terbentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan yang responsif gender **Out come** Terbentuknya Kampung Iklim baru	

Sikabau, 30 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

(Silaturrahim, S.K.M., M.H)
NIP. 19790330 200604 2 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	KepalaDinasSosial P3A PPKB
Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP 196812201999009 1 001	ASRIL, AP.,M.Si NIP 19750225 199501 1 001	H. PARYANTO, S.Sos, M.T NIP19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sasaran Program		Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim 2. Surat Edaran Gubernur Sumatera barat nomor 660/206/TL/DLH-2022 Perihal Pengusulan Lokasi Proklim Tahun 2022
	Gambaran Umum	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat di Nagari yang akan dibentuk Kampung Iklim
	Indikator Kinerja	Terbentuknya Kampung Iklim
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan kegiatan dampak perubahan iklim dengan membentuk Kampung Iklim
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan Pengendalian Emisi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Nagari Sialang gaung, Kecamatan Koto baru
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 35.254.200

Sikabau, 30 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

(Silaturrahim, S.K.M., M.H)
NIP. 19790330 200604 2 003

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	
Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
Program	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Sumber Pendanaan		
Lokasi Kegiatan		
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2023
Kelompok Sasaran		
Jumlah 2022		**35.254.200**
Jumlah 2023		**147.917.400**
Jumlah 2024		

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		**147.917.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					**147.917.400**
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					
5.1.02.01.01	BELANJA BARANG PAKAI HABIS					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas					15.417.400
	BBM Bensin Spesifikasi : Pertalit	1964	liter	7.850	0	15.417.400
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk					50.000.000

	dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat					
	Hadiah Perlombaan	1	Paket	10.000.000	0	10.000.000
	Bibit Tanaman, buah dan Bunga	1	Paket	40.000.000	0	40.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk *Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor*					2.500.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	10	Buah	250.000	0	2.500.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					15.000.000
	Nasi	500	Bungkus	22.000	0	11.000.000
	Snack	500	Kotak	8000	0	4000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Pembawa Acara dan Panitia					5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					60.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					40.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas *Dalam Kota*					20.000.000
Grand Total						**147.917.400**

Sikabau, 30 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(Silaturrahim, S.K.M., M.H)
NIP. 19790330 200604 2 003

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise delivery)

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat **Kegiatan :** Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya mengacu pada Undang- undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu sekolah yang dibina untuk mengikuti Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup menuju Nasional tahun 2022 adalah SDN 06 Sitiung Jumlah guru sekolah : 15 orang, Laki-laki 4 orang (27%), Perempuan 11 orang (73%)	**Akses:** Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam pembinaan belum maksimal **Partisipasi:** Terdapat kesenjangan antara jumlah guru laki-laki (27%) dan perempuan (73%) **Manfaat :** Meningkatnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah	• Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender • Kurangnya Pemahamanan SDM tentang Pengarusutamaan Gender	• Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal • Masih rendahnya alokasi dana	Bertambahnya sekolah berwawasan lingkungan yang responsiv gender	1. Sosialisasi tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah yang responsiv gender 2. Pembinaan Terhadap Guru dan kelompok Masyarakat 3. Pemberian Penghargaan Terhadap Sekolah yang memperoleh gelar sekolah berwawasan lingkungan	Tercapainya tingkat kesadaran guru dalam Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	**Out put** Meningkatnya Peran guru dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan yang responsiv gender **Out come** Terbentuknya Sekolah berwawasan lingkungan

Tujuan : Membentuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah								

Sikabau, 30 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

(Silaturrahim, S.K.M., M.H)
NIP. 19790330 200604 2 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL,AP.,M.Si NIP 19750225 199501 1 001	H. PARYANTO, S.Sos, M.T NIP19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(PernyataanAnggaran Gender)

SKPD : **Dinas Lingkungan Hidup**
TAHUN ANGGARAN : **2023**

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="3">Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="3">2.11.09</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="3">Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</td></tr>
<tr><td>HASIL/OUTPUT</td><td colspan="3">Bertambahnya sekolah berwawasan lingkungan yang responsiv gender</td></tr>
<tr><td>ANALISA SITUASI</td><td colspan="3">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
Salah satu sekolah yang dibina untuk mengikuti Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup menuju Nasional tahun 2022 adalah SDN 06 Sitiung, Jumlah guru sekolah : 15 orang, Laki-laki 4 orang (27%), Perempuan 11 orang (73%)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
a) Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam pembinaan belum maksimal
b) Terdapat kesenjangan antara jumlah guru laki-laki (27%) dan perempuan (73%)
b. Penyebab Internal
a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender
b) Kurangnya Pemahamanan SDM tentang Pengarusutamaan Gender
c. Penyebab Eksternal
a) Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal
b) Masih rendahnya alokasi dana</td></tr>
<tr><td>RENCANA AKSI</td><td>Komponen/ Aktifitas 1</td><td colspan="2">Sosialisasi tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah yang responsiv gender</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tujuan</td><td>Untuk mengetahui pemahaman tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah yang responsiv gender</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Komponen/ Aktifitas 2</td><td colspan="2">Pemberian Penghargaan Terhadap Sekolah yang memperoleh gelar sekolah berwawasan lingkungan</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tujuan</td><td>Agar sekolah lebih termotivasi untuk mengikuti gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Total Anggaran</td><td colspan="2">49.200.000</td></tr>
</table>

Capaian Program	**Out put** Meningkatnya Peran guru dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan yang responsiv gender **Out come** Terbentuknya Sekolah berwawasan lingkungan

Sikabau, 30 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

(Silaturrahim, S.K.M., M.H)
NIP. 19790330 200604 2 003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	KepalaDinasSosial P3A PPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL,AP, M.St NIP 19750225 199601 1 001	H. PARYANTO, S.Sos, M.T NIP19690609 198802 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Kegiatan		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
Latar Belakang	Dasar Hukum	Undang- undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
	Gambaran Umum	Kegiatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan terhadap Sekolah yang berwawasan lingkungan
	Indikator Kinerja	Terbentuknya Sekolah yang berwawasan lingkungan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Membentuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Sekolah Se-Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 8.753.000

Sikabau, 30 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

(Silaturrahim, S.K.M., M.H)
NIP. 19790330 200604 2 003

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	
Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
Program	2.11.09	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Kegiatan	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
Sumber Pendanaan		
Lokasi Kegiatan		
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2023
Kelompok Sasaran		
Jumlah 2021		
Jumlah 2022		**8.753.000**
Jumlah 2023		**49.200.000**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		**49.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					
5.1.02.01.01	BELANJA BARANG PAKAI HABIS					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas					5.200.000
	BBM Bensin Spesifikasi : Pertalit	400	liter	7.850	0	3.140.000
	BBM Solar Spesifikasi : Solar	400	liter	5.150	0	2.060.000

5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1	Paket			10.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat					10.000.000
	Hadiah Perlombaan	1	Paket	10.000.000	0	10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor					1.000.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	4	Buah	250.000	0	1.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					9000.000
	Nasi	300	Bungkus	22.000	0	6.600.000
	Snack	300	Kotak	8000	0	2.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Pembawa Acara dan Panitia					4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.000.000
Grand Total						49.200.000

Sikabau, 30 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

(Silaturrahim, S.K.M., M.H)
NIP. 19790330 200604 2 003

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Mengatasi Kesenjangan Gender Yang Terjadi

OPD : Inspektorat Kabupaten
PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
TAHUN : 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal **Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah** **Tujuan : Agar Terlaksananya Pengawanan Internal dalam Rangka Pencapaian PKPT dengan mempertimbangkan Proporsi Anggota Tim yang Laki-laki dan Perempuan**	- jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 33 orang yang terdiri dari laki-laki 17 dan 16 perempuan	- Akses : Pengawasan yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 5 hari dengan lokasi pelaksanaan yang jauh dari Kantor Inspektorat ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi Anggota Tim terutama yang perempuan karena harus melakukan pengawasan terutama untuk kegiatan cek fisik ke lapangan dengan jarak yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua terlebih bagi APIP yang hamil dan menyusui - Tidak semua Anggota Tim dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik karena kondisi dari Kantor Inspektorat ke wilayah pemeriksaan di seluruh Kabupaten Dharmasraya sehingga Anggota Tim Perempuan yang hamil/menyusui	- Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga - Adanya perbedaan dalam proporsi pemeriksaan antara Anggota Tim Laki-laki dan Perempuan	Lokasi pemeriksaan yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua dari Kantor Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	Pelaksanaan pemeriksaan disesuikan dengan proporsi laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan jarak dan medan lokasi pemeriksaan	Memetakan pemeriksaan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas sehingga pemeriksaan yang akan diikuti telah memperhatikan angggota Tim laki-laki dan perempuan mengenai jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua	Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 33 orang yang terdiri dari 17 laki-laki dan 16 perempuan	Output : Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas Outcome : Semua Anggota Tim dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dan kondisi jaran dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua

		kesulitan karena jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua sedangkan semua APIP dituntut dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan						

Pulau punjung, 30 Maret 2022

INSPEKTUR

KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CFrA

NIP. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

Inspektur,	**Kepala BKD**	**Kepala Bapppeda**	**Kepala Dinas Dinsos,P3A,PPKB**
Drs. Andy Sumanto, CfrA	**Asrik, AP., M.Si**	**Paryanto, S.Sos., MT**	**Bobby P. Riza, SSTP., M.Si**
NIP. 19681220 199009 1 001	NIP. 19750226 199501 1 001	NIP. 19690609 198902 1 001	NIP. 19820521 200012 1 002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD	**: Inspektorat Kabupaten**
TAHUN ANGGARAN	**: 2023**
PROGRAM	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
KODE PROGRAM	6.01.02
KEGIATAN	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
HASIL/OUTPUT	Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** - jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 33 orang yang terdiri dari laki-laki 17 dan 16 perempuan . **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Faktor Kesenjangan - Akses : Pengawasan yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 5 hari dengan lokasi pelaksanaan yang jauh dari Kantor Inspektorat ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi Anggota Tim terutama yang perempuan karena harus melakukan pengawasan terutama untuk kegiatan cek fisik ke lapangan dengan jarak yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua terlebih bagi APIP yang hamil dan menyusui - Tidak semua Anggota Tim dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik karena kondisi dari Kantor Inspektorat ke wilayah pemeriksaan di seluruh Kabupaten Dharmasraya sehingga Anggota Tim Perempuan yang hamil/menyusui kesulitan karena jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua sedangkan semua APIP dituntut dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan b. Penyebab Internal - Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga - Adanya perbedaan dalam proporsi pemeriksaan antara Anggota Tim Laki-laki dan Perempuan c. Penyebab Eksternal Lokasi pemeriksaan yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua dari Kantor Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1** : Memetakan pemeriksaan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas sehingga pemeriksaan yang akan diikuti telah

KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang perencanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2020 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah
	Gambaran Umum	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan internal secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Meliputi Kegiatan pengawasan internal berupa Audit, Reviu dan Monitoring
	Indikator Kinerja	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan/pengawasan terhadap objek pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada instansi/OPD, Nagari dan Sekolah di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya tepat waktu dan PKPT tercapai 100%
	Batasan Kegiatan	Kegiatan pemeriksaan/pengawasan sesuai dengan PKPT
Maksud dan Tujuan		Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melakukan kegiatan pemeriksaan/pengawasan terhadap obyek pemeriksaan sesuai PKPT secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD Penanggung Jawab : Inspektur
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 121.981.400,-

Pulau Punjung , 16 Juni 2022

INSPEKTUR

KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CFrA

NIP. 19681220 199009 1 001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat Kabupaten
Sub Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.01	Inspektorat Kabupaten
Kegiatan	: 6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Dharmasraya
WaktuPelaksanaan : Januari s.d Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan:

(Indikator)	(Target)
Terlaksananya Pemeriksaan Keuangan	90 OPD

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.121.981.400
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					Rp.121.981.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp.7.881.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas					Rp.7.881.400
	[#]					
	[-]					
	BBM Bensin Spesifikasi : Pertalite	1004 Liter	liter	7.850	0	Rp.7.881.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp.98.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp.98.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten- Uang Harian Spesifikasi : PTT/Non PNS/Sopir	24	Orang/ Hari	100.000	0	Rp. 2.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten- Uang Harian Spesifikasi : Gol.II/Gol.I	35	Orang/ Hari	110.000	0	Rp. 3.850.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten- Uang Harian Spesifikasi : PEJABAT Ess.IV/Gol.III	40	Orang/ Hari	120.000	0	Rp. 4.800.000

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten- Uang Harian Spesifikasi : PEJABAT Ess.III/Gol.IV	25	Orang/ Hari	130.000	0	Rp. 3.250.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten- Uang Harian Spesifikasi : PEJABAT Ess.IIB/Anggota DPRD	10	Orang/ Hari	140.000	0	Rp. 1.400.000
Jumlah Anggran Sub Kegiatan :						Rp. 121.981.400

Pulau Punjung, 16 Juni 2022
INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CFrA
NIP. 19681220 199009 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Mengatasi Kesenjangan Gender Yang Terjadi

OPD : Inspektorat Kabupaten
PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
TAHUN : 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** **Tujuan : Agar Diklat Dapat diikuti Oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan**	**Data Pembuka Wawasan** -jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 33 orang yang terdiri dari laki-laki 17 dan 16 perempuan - Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebanyak 31 orang	**Faktor Kesenjangan** - Akses : diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui - Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga	**Sebab Kesenjangan Internal** - Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga - Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan	**Sebab Kesenjangan Eksternal** Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relative lama	**Reformulasi Tujuan** Pelaksanaan diklat disesuikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	**Rencana Aksi** Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut	**Data Dasar (Baseline)** -Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 33 orang yang terdiri dari 17 laki-laki dan 16 perempuan - Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebnyak 31 orang	**Indikator Gender** Output : Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi. Outcome : Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesui program/kegiatan yang ada.

		lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, dimana yang berlatarbelakang pendidikan teknik sipil sangat kecil, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/program/kegiatan						

Pulau punjung, 30 Maret 2022
INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CFrA
NIP. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

Inspektur,	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Dinsos,P3A,PPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA	**Asrul, AP., M.Si**	**Paryanto, S.Sos., MT**	**Bobby P. Riza, SSTP., M.Si**
NIP. 19681220 199009 1 001	NIP. 19730203 199501 1 001	NIP. 19690609 198902 1 001	NIP. 19820521 200012 1 002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : **Inspektorat Kabupaten**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KODE PROGRAM	6.01.01
KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
HASIL/OUTPUT	Pelaksanaan diklat disesuikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan** - jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 33 orang yang terdiri dari laki-laki 17 dan 16 perempuan. - Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebnyak 31 orang. **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Faktor Kesenjangan - Akses : diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui - Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, dimana yang berlatarbelakang pendidikan teknik sipil sangat kecil, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/ program/kegiatan b. Penyebab Internal - Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. - Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan. c. Penyebab Eksternal Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relative lama.

RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akaan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut	
		Tujuan	Agar Diklat Dapat diikuti Oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 286.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	Output : Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi. Outcome : Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/ kegiatan yang ada.		

Pulau Punjung, 30 Maret 2022
INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CfrA
NIP. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

Inspektur,	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Dinsos,P3A,PPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	**Agus, AP., M.Si** NIP. 19750225 199501 1 001	**Paryanto, S.Sos., MT** NIP. 19690609 198902 1 001	**Bobby P. Riza, SSTP., M.Si** NIP. 19820521 200012 1 002

		memperhatikan angggota Tim laki-laki dan perempuan mengenai jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua	
		Tujuan	Agar Terlaksananya Pengawanan Internal dalam Rangka Pencapaian PKPT dengan mempertimbangkan Proporsi Anggota Tim yang Laki-laki dan Perempuan
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 150.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	Output : Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas Outcome : Semua Anggota Tim dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dan kondisi jaran dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua		

Pulau Punjung, 30 Maret 2022
INSPEKRTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CfrA
NIP. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

Inspektur,	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Dinsos,P3A,PPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	**Asril, AP., M.Si** NIP. 19730225 199501 1 001	**Paryanto, S.Sos., MT** NIP. 19690609 198902 1 001	**Bobby P. Riza, SSTP., M.Si** NIP. 19820521 200012 1 002

KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER 1274/K/JF/2010 Tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
	Gambaran Umum	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur yang dapat diikuti oleh seluruh APIP sesuai kebutuhan fungsionalnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Meliputi Kegiatan Pelatihan dan pengembangan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan konferensi
	Indikator Kinerja	Memiliki Auditor/PPUPD yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
	Batasan Kegiatan	Kegiatan Diklat Perjenjangan dan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan jadwal diklat yang diterbitkan
Maksud dan Tujuan		1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan sikap profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Menentukan kelayakan dalam memenuhi syarat kompetensi APIP; 3. Pengembangan profesi APIP.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Melakukan analisa rencana kebutuhan Diklat Perjenjangan Jabatan fungsional Auditoc/PPUPD dan peningkatan Kapabilitas APIP dengan menganalisa Peta Kompetensi ASN 2. Mengumpulkan data dan persyaratan pendaftaran Diklat 3. Mengajukan Surat Usulan peserta Diklat
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan penyelenggara Diklat (BPKP dan BPSDM Kemendagri)
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Sub Bagian Penganggaran dan keuangan Penanggung Jawab : Inspektur
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 179.997.150,-

Pulau Punjung , 16 Juni 2022

INSPEKTUR

KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CFrA

NIP. 19681220 199009 1 001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat Kabupaten
Sub Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.01	Inspektorat Kabupaten
Kegiatan	: 6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan:

(Indikator)	(Target)
Terlaksananya Diklat Subtantif dan Perjenjangan	33 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.179.997.150
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					Rp.179.997.150
5.1.02.01	BELANJA BARANG					Rp.7.999.150
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas					Rp.7.999.150
	[#]					
	[-]					
	BBM Bensin Spesifikasi : Pertalite	1019 Liter	Liter	7.850	0	Rp.7.999.150
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp.98.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp.98.400.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp.98.400.000
	Uang Kontribusi Diklat Substantif/Spesifikasi : orang	10	Rupiah/ orang	3.000.000	0	Rp.30.000.000
	Uang Kontribusi Diklat Penjenjangan atau Pembentukan Auditor/Spesifikasi : orang	12	Rupiah/ orang	5.700.000	0	Rp.68.400000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp.73.598.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp.73.598.000
5.1.02.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp.73.598.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah DalamP rovinsi Sumatera Barat Spesifikasi : Uang Harian PTT/Non PNS/Sopir	5	Orang/ Hari	200.000	0	Rp.1.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : Uang Harian Gol.II/Gol.I	5	Orang/ Hari	250.000	0	Rp.1.250.000
	Standar Perjalanan	10	OH	350.000	0	Rp.3.500.000

	Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : Akomodasi PEJABAT Eselon IV/Gol III					
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : Uang Harian PEJABAT Ess.III/Gol IV	5	OH	360.000	0	Rp.1.800.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : Akomodasi PEJABAT Ess.IIB/Aggota DPRD	3	OH	370.000	0	Rp1.110.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : PTT/Non PNS/Sopir	4	OH	650.000	0	Rp.2.600.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : Gol II /Gol I	4	OH	650.000	0	Rp.2.600.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi :Akomodasi PEJABAT Ess. IV/Gol III	5	OH	650.000	0	Rp.3.250.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : PEJABAT Ess III/Gol IV	4	OH	1.353.000	0	Rp.5.412.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi : PEJABAT Ess IIB/Anggota DPRD	2	OH	3.150.000	0	Rp.6.300.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi-biaya penginapan Spesifikasi : PEJABAT Ess.II/Gol.I	7	OH	730.000	0	Rp.5.110.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi-biaya penginapan Spesifikasi: PEJABAT Ess.IV/Gol.III	11	OH	730.000	0	Rp.8.030.000

	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi-biaya penginapan Spesifikasi: PEJABAT Ess.III/Gol.IV	8	OH	992.000	0	Rp.7.936.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi-biaya penginapan Spesifikasi: PEJABAT Ess.IB/Anggota DPRD	3	OH	1.400.000	0	Rp.4.200.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi-Uang Harian Spesifikasi: Gol.II/Gol.I	8	OH	500.000	0	Rp.4.000.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi-Uang Harian Spesifikasi: Ess.IV/Gol.III	14	OH	510.000	0	Rp.7.140.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi-Uang Harian Spesifikasi: Ess.III/Gol.IV	12	OH	520.000	0	Rp.6.240.000
	Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi-Uang Harian Spesifikasi: Ess.IIB/Anggota DPRD	4	OH	530.000	0	Rp.2.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp.179.997.150
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp.179.997.150

Pulau Punjung , 16 Juni 2022

INSPEKTUR

KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CFrA

NIP. 19681220 199009 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

INDICATOR KINERJA UTAMA SKPD

OPD : Kecamatan Koto Baru

PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan **Kegiatan** : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa **Tujuan** : Persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang. Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang **Tahun 2021:** 82 org **Tahun 2022 :** 100 org Tahun 2021, dari 82 yang hadir, diikuti sebanyak 55 orang peserta laki-laki dan sebanyak 27 orang peserta perempuan. Tahun 2022, dari 100 orang yang hadir, diikuti sebanyak 48 orang peserta laki-laki dan sebanyak 52 orang peserta perempuan Dari notulen usulan musrenbang 2022 jumlah peserta laki-laki yang diundang 48	- **Partisipasi** : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang. - **Kontrol** : Dalam Musrenbang Peserta Perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya - **Manfaat :** Belum semua Peserta perempuan mengetahui manfaat dari Musrenbang. .	- Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang - Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari keterwakilan unsur perempuan yang disediakan - Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang -	- Kurangnya keinginan atau minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang - Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang - Adanya kesibukan lain dari calon peserta Musrenbang - Sosial budaya Minang Kabau dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat.	- Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 yang responsif gender.	- Mengumpulkan DURKP Nagari. - Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan. - Distribusi undangan ke nagari. - Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan musrenbang berjalan lancar. - Merekomendasikan ke Bapppeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan	- Meningkatnya kehadiran peserta musrenbang dari berbagai unsur. - Tersusunnya usulan prioritas kecamatan. - Dari kehadiran tahun 2022 lebih dominan perempuan dari pada laki-laki , perbandingannya dan perempuan 52 % dan laki-laki 48 % - Peserta laki-laki yang menyampaikan usulan sebanyak 39 orang (80 %) dan peserta perempuan sebanyak 36 orang (65 %) - Musrenbang 2022 jumlah peserta laki-laki yang	**Output tahun 2023 :** Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 80 % menjadi 85 % serta peran usulan perempuan dari 65% menjadi 75%. **Outcome :** Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD yang responsif gender.

	orang, yang hadir 48 orang yang menyampaikan usulan sebanyak 39 orang (80 % dari jumlah peserta laki-laki yang hadir), peserta perempuan yang diundang sebanyak 52 orang yang hadir 52 orang dan yang menyampaikan usulan sebanyak 36 orang (65 % dari jumlah peserta perumpuan yang hadir)					dalam kegiatan musrenbang. - Melakukan sosialisasi internal tentang pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang.	diundang 448 orang yang hadir 48 orang yang menyampaikan usulan sebanyak 39 orang (80 %). - Peserta perempuan yang diundang sebanyak 52 orang yang hadir 52 orang dan yang menyampaikan usulan sebanyak 36 orang (65 %).	

Camat Koto Baru

Hasnul Hadi, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP 19800105 200701 1 023

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial,P3APPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL, AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos.M.T NIP 19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD	**: *KECAMATAN KOTO BARU***
TAHUN ANGGARAN	**: *2023***
PROGRAM	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
KODE PROGRAM	7.01.03
KEGIATAN	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).** - Kegiatan musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya. - Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang. - Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang (Tahun 2021 sebanyak 82 orang serta tahun 2022 sebanyak 100 orang). - Pada Tahun 2021 dari 82 orang yang mengikuti kegiatan, terdapat 55 orang peserta laki-laki dan 27 orang peserta perempuan. - Pada Tahun 2021 dari 100 orang yang mengikuti kegiatan, terdapat 48 orang peserta laki-laki dan 52 orang peserta perempuan. - Dari notulen usulan musrenbang 2022 jumlah peserta laki-laki yang diundang 48 orang yang hadir 48 orang dan yang menyampaikan usulan sebanyak 39 orang (80%), peserta perempuan yang diundang sebanyak 52 orang yang hadir 52 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 36 orang (65%). **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Faktor Kesenjangan **Partisipasi :** Masih Banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan Musrenbang **Manfaat :** Belum semua Peserta perempuan mengetahui manfaat dari Musrenbang **Kontrol** : Dalam Musrenbang Peserta Perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya. b. Penyebab Internal - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang - Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari keterwakilan unsur perempuan yang disediakan - Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang c. Penyebab Eksternal - Kurangnya keinginan atau minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang - Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang - Adanya kesibukan lain dari calon peserta Musrenbang - Sosial budaya Minang Kabau dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat.
CAPAIAN KEGIATAN	**Tolok Ukur** Meningkatnya peran pemberdayaan masyarakat yang responsif gender dalam menyampaikan usulan kegiatan musrenbang, sehingga perempuan dapat menyampaikan aspirasinya.
	Indikator dan Target Kinerja **Output tahun 2023 :** Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 80 % menjadi 85 % serta peran usulan perempuan dari 65% menjadi 75%.

	Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD yang responsif gender.		
RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan 1**	**Mengumpulkan DURKP Nagari**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Terkumpulnya DURKP Nagari
	Sub Kegiatan 2	**Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Tersusunnya data berdasarkan urutan prioritas
	Sub Kegiatan 3	**Distribusi undangan ke nagari**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 kegiatan
		Hasil	Tersebarnya undangan ke sasaran
	Sub Kegiatan 4	**Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 kegiatan
		Hasil	Terwujudnya kepastian kehadiran pihak terkait
	Sub Kegiatan 5	**Merekomendasikan ke Bapppeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikut sertaan perempuan dalam kegiatan musrebang**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Terlaksananya penyampaian usulan ke Bapppeda untuk membuat regulasi/kebijakan keikut sertaan perempuan dalam kegiatan musrenbang.
	Sub Kegiatan 6	**Melakukan sosialisasi internal tentang pentingnya keterwakilan perempuan di musrenbang**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Terwujudnya kesadaran ke para perempuan, sehingga untuk kedepannya dapat berperan dalam musrenbang.
	Total anggaran		Rp 9.650.000,-

Koto Baru, Maret 2022

Camat Koto Baru

Hasnul Hadi, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP 19800105 200701 1 023

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial,P3APPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL, AP.,M.Si NIP 19750225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos.M.T NIP 19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Sasaran Program		Pemangku kepentingan/stakeholders, OPD, Instansi Vertikal, Nagari, Lembaga Swadaya Kemasyarakatan (LSM), Organisasi Masyarakat dan Masyarakat
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Des
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahar Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Gambaran Umum	Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan forum musyawarah tahunan dan menjadi salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah keatas, atau bottom-up. Musrenbar tingkat kecamatan merupakan tahapan musrenbang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat Nagari.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Menajamkan, menyelaraskan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencanan kegiatan pembangunan nagari yang di integrasikan dalam prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan
	Indikator Kinerja	1. Daftar Program dan Kegiatan Pembangunan per OPD. 2. UsulanKegiatan Pembangunan Kecamatan Tahun berikutnya yang akan diusulkan ke-Perangka Daerah 3. UsulanKegiatan Prioritas di wilayah kecamatan
	Batasan Kegiatan	Mendiskusikan masalah yang dihadapi dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPPEDA)
Maksud dan Tujuan		1. Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat kelurahan (dan atau lintas kelurahan) yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan kecamatan dan lintas kecamatan untuk satuntahun mendatang. 2. Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forumforum SKPD dan Musrenbang kota. 3. Meenetapkan delegasi kecamatan untuk mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatanbyang merupakan kegiatan supra kecamatan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui diskusi, pemaparan, tanya jawab
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa Penanggung Jawab : Camat Koto Baru
Jadwal		Bulan Februari 2022
Biaya		Rp. 9.650.000,-

Koto Baru, Maret 2022

Camat Koto Baru

Hasnul Hadi, SE
Penata TK. I (NI/d)
NIP 19800105 200701 1 023

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise delivery)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penanggulangan Bencana **Kegiatan :** Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana **Sub Kegiatan :** Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan SPM Sub Kebencanaan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan. Ketika terjadinya bencana, warga negara rentan menjadi korban bencana tersebut adalah kaum wanita, anak-anak dan lansia. Jumlah korban bencana pada tahun 2021 sebanyak 4530 orang terdiri dari : • Anak-anak :1076 orang • Perempuan Deawasa : 1687 orang • Laki-laki dewasa : 1052 orang • Lansia : 715 orang	**Akses:** Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan yang menjadi peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. **Partisipasi:** (Minimnya minat kaum perempuan menngikuti sosialisasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bercana di daerah rawan bencana)	Belum maksimal dalam meminta peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana	• Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal • Kecendrungan dimasyarakat yang mengikuti kegiatan terkait pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana hanya diikuti oleh laki-laki	Memprioritaskan kepersertaan perempuan dalam kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencanaa untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti	Meningkatnya kewasapadaan kelompok rentan yang terdampak oleh bencana diantaranya kaum perempuan, anak-anak dan lansia dalam menghadapi bencana	**Out put :** Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan **Out come** Menurunnya tingkat resiko bencana bagi kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan lansia).

Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana								

Pulau Punjung, 1 April 2022

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN DHARMASRAYA

ELDISON, ST
NIP. 19730712 200501 1 012

Tim Verifikasi

Inspektur,

Drs. Andy Sumanto, CFrA
NIP 19681220 199009 1 001

Kepala BKD,

Asril, AP, M.Si
NIP 19750225 1995011001

Kepala Bapppeda,

Paryanto, S.Sos,M.T
NIP 19690609 198902 1 001

Kepala Dinas Sosial P3A PPKB

BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(PernyataanAnggaran Gender)

SKPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
TAHUN ANGGARAN : **2023**

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="2">PENANGGULANGAN BENCANA</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="2">1.05.03</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="2">Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</td></tr>
<tr><td>HASIL/OUTPUT</td><td colspan="2">Meningkatnya kewaspadaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dalam menghadpi bencana</td></tr>
<tr><td>ANALISA SITUASI</td><td colspan="2">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
Jumlah korban bencana pada tahun 2020 sebanyak 3119 orang terdiri dari :
• Anak-anak :1076 orang
• Perempuan Deawasa : 1687 orang
• Laki-laki dewasa : 1052 orang
• Lansia : 715 orang</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
a) Tingginya tingkat resiko bencana bagi kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan lansia)
b) Rendahnya minat kaum perempuan dalam mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
b. Penyebab Internal
Belum maksimal dalam meminta peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana
c. Penyebab Eksternal
a) Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal
b) Kecendrungan dimasyarakat yang mengikuti kegiatan terkait pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana hanya diikuti oleh laki-laki</td></tr>
<tr><td>RENCANA AKSI</td><td>Komponen/ Aktifitas 1</td><td>Melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
Tujuan : Meningkatnya kewasapadaan kelompok rentan yang terdampak oleh bencana diantaranya kaum perempuan, anak-anak dan lansia dalam menghadapi bencana
Alokasi Anggaran :</td></tr>
<tr><td></td><td>Komponen/ Aktifitas 2</td><td>Melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
Tujuan : Meningkatnya kewasapadaan kelompok rentan yang terdampak oleh bencana diantaranya kaum perempuan, anak-anak dan lansia dalam menghadapi bencana
Alokasi</td></tr>
</table>

		Anggaran	
	Total Anggaran	**75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)**	
Capaian Program	**Out put :** Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan **Out come** Menurunnya tingkat resiko bencana bagi kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan lansia).		

Pulau Punjung, 1 April 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ELDISON, ST
NIP. 19730712 200501 1 012

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	KepalaBapppeda	KepalaDinasSosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA	**Asril, AP, M, Si**	**Paryanto, S.Sos,M.T**	**BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si**
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 197502251995011001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penanggulangan Bencana
Sasaran Program		Terlaksananya penanggulangan bencana di daerah
Kegiatan		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan
	Gambaran Umum	Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Kegiatan berupa pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sesuai dengan potensi bencana yang berada di kawasan rawan bencana
	Indikator Kinerja	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (orang)
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dalam menghadapi bencana
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat yang berdomisili di kawasan rawan bencana untuk mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di tempat yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan dengan kondisi tempat
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya
Jadwal		Bulan Maret 2023
Biaya		Rp. 75.000.000,-

Pulau Punjung, 1 April 2022
Kepala Pelaksana,

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ELDISON, ST
NIP. 19730712 200501 1 012

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
Sumber Pendanaan		APBD
Lokasi Kegiatan		Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2023
Kelompok Sasaran		Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
Jumlah 2022		29.055.000 (Dua puluh Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah)
Jumlah 2023		**75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)**
Jumlah 2024		85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Menurunkan tingkat resiko bencana	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	75.000.000,-
Keluaran	Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 orang
Hasil	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5	**BELANAJA DAERAH**					
5.1	**BELANJA OPERASI**					**75.000.000**
5.1. 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**					**75.000.000**
5.1.2.01	**BELANJA BARANG**					**75.500.000**
5.1.2.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					
5.1.2.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**2.425.000**
	BBM Dexlite	250	liter	9.700		2.425.000
5.1.2.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.000.000**
	Makan dan Minum Rapat/ Pertemuan Spesifikasi : Snack	300	Kotak	8.000	0	2.400.000
	Makan dan Minum Rapat/ Pertemuan Spesifikasi : Nasi	300	Kotak	22.000	0	6.600.000
5.1.2.01.01.0054	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**16.500.000,-**
	ATK Bimtek/ Sosialisasi/pelatihan Spesifikasi : ATK Pelatihan (+tas)	120	Paket	100.000	0	12.000.000
	Cetak Dokumentasi Spesifikasi : Belanja Dokumentasi (Publikasi)	10	Paket	200.000	0	2.000.000
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5	Buah	250.000	0	2.500.000
5.1.02.01.01.0056	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**5.580.000**
	Foto Copy Spesifikasi :	18.600	lembar	300	0	5.580.000

5.1.02.02	BELANJA JASA					10.000.000
5.1.02.02.01	BELANJA JASA KANTOR					10.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Pembawa Acara dan Panitia	1	Paket	10.000.000		10.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**31.500.000**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Paket	15.000.000		10.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Paket	31.500.000		21.500.000
Grand Total						**75.000.000**

Pulau Punjung, 1 April 2022

Kepala Pelaksana,

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ELDISON, ST

NIP. 19730712 200501 1 012

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise delivery)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penanggulangan Bencana **Kegiatan :** Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana **Sub Kegiatan :** Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan SPM Sub Kebencanaan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan. Jumlah personil khusus kebencanaan sebanyak 15 orang yang terbagi menjadi 3 regu. Masing-masing regu beranggota 5 orang. • Laki-laki : 15 orang • Perempuan : -	**Akses:** Belum ada petugas/ personil khusus kebencanaan dari perempuan	• Tidak adanya keinginan kaum perempuan untuk menjadi petugas/ personil khusus kebencanaan • Kurangnya Pemahamanan internal Perangkat Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	• Beratnya beban kerja bagi personil khusus kebencanaan ketika terjadi bencana sehingga apabila dilaksanakan oleh perempuan akan menjadi kesulitan. • Kecendrungan yang menjadi petugas/ personil khusus kebencanaan hanya diikuti oleh laki-laki	Adanya petugas khusus kebencanaan dari kalangan perempuan	1. Memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi petugas/ personil khusus kebencanaan 2. Memberikan keringanan beban kerja bagi kaum perempuan yang beringinan menjadi petugas khusus kebencanaan	Adanya partisipasi kaum perempuan sebagai personil khusus kebencanaan dalam rangka upaya penanggulangan bencana	**Out put :** Meningkatnya partipasi kaum perempuan sebagai personil khusus kebencanaan **Out come** Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bagi kaum perempuan

Tujuan : Mengurangi jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan terjadinya bencana								

Pulau Punjung, 1 April 2022

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN DHARMASRAYA

ELDISON, ST
NIP. 19730712 200501 1 012

Tim Verifikasi

Inspektur,

Drs. Andy Sumanto, CFrA
NIP 19681220 199009 1 001

Kepala BKD,

Asril, AP, M.Si
NIP 19750225 199501 1001

Kepala Bapppeda,

Paryanto, S.Sos,M.T
NIP 19690609 198902 1 001

Kepala Dinas Sosial P3A PPKB

BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(PernyataanAnggaran Gender)

SKPD : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
TAHUN ANGGARAN : **2023**

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="3">PENANGGULANGAN BENCANA</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="3">1.05.03</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="3">Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</td></tr>
<tr><td>HASIL/OUTPUT</td><td colspan="3">Meningkatnya jumlah personil yang aktif dalam penanganan darurat bencana</td></tr>
<tr><td>ANALISA SITUASI</td><td colspan="3">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Jumlah personil khusus kebencanaan sebanyak 15 orang yang terbagi menjadi 3 regu. Masing-masing regu beranggota 5 orang.
• Laki-laki : 15 orang
• Perempuan : -</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
Belum ada petugas/ personil khusus kebencanaan dari kaum perempuan
b. Penyebab Internal
1. Tidak adanya keinginan kaum perempuan untuk menjadi petugas/ personil khusus kebencanaan
2. Kurangnya Pemahamanan internal Perangkat Daerah tentang Pengarusutamaan Gender
c. Penyebab Eksternal
a) Beratnya beban kerja bagi personil khusus kebencanaan ketika terjadi bencana sehingga apabila dilaksanakan oleh perempuan akan menjadi kesulitan.
b) Kecendrungan yang menjadi petugas/ personil khusus kebencanaan hanya diikuti oleh laki-laki</td></tr>
<tr><td>RENCANA AKSI</td><td>Komponen/ Aktifitas 1</td><td colspan="2">Melaksanakan perekrutan personil baru dari kaum perempuan</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tujuan</td><td>Mengurangi jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan terjadinya bencana</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Komponen/ Aktifitas 2</td><td colspan="2">Memberikan pelatihan pengembangan bagi petugas khusus kebencanaan</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tujuan</td><td>Mengurangi jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan terjadinya bencana</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr>
</table>

	Total Anggaran	**65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah)**
Capaian Program	**Out put :** Meningkatnya partipasi kaum perempuan sebagai personil khusus kebencanaan **Out come** Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana bagi kaum perempuan	

Pulau Punjung, 1 April 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ELDISON, ST
NIP. 19730712 200501 1 012

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	KepalaBapppeda	KepalaDinasSosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA	**Ashwan, M. Si**	**Paryanto, S.Sos,M.T**	**BOBBY P. RIZA, S.STP,M.S**
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 197502251995011001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Penanggulangan Bencana
Sasaran Program		Terlaksananya Penanggulangan Bencana di daerah
Kegiatan		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Sub Kegiatan		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Latar Belakang	Dasar Hukum	Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan
	Gambaran Umum	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang terkait pada saat terjadi tanggap darurat bencana
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melaksanakan aktivasi sistem komando penanganan bencana saat status darurat bencana
	Indikator Kinerja	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Membentuk posko darurat bencana pada saat terjadinya bencana
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam penanganan darurat bencana
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2023
Biaya		Rp. 65.000.000,-

Pulau Punjung, 1 April 2022

KEPALA PELAKSANA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ELDISON, ST

NIP. 19730712 200501 1 012

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan	1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Sub Kegiatan	1.05.03.2.03.05	*Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana*
Sumber Pendanaan		APBD
Lokasi Kegiatan		Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2023
Kelompok Sasaran		Petugas penanggulangan bencana
Jumlah 2022		-
Jumlah 2023		**65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah)**
Jumlah 2024		65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Menurunkan tingkat resiko bencana	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	65.000.000,-
Keluaran	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	15 orang
Hasil	Meningkatnya kapasitas personil dalam penanggulangan bencana	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	**BELANJA OPERASI**					**65.000.000**
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**					**65.000.000**
5.1.02.01	**BELANJA BARANG**					**30.000.000**
5.1.02.01.01	**BELANJA BARANG PAKAI HABIS**					**30.000.000**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Paket	10.000.000		10.000.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Paket	5.000.000		5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Paket	15.000.000		15.000.000
5.1.02.02	**BELANJA JASA**					**35.000.000**
5.1.02.02.01	**BELANJA JASA KANTOR**					**35.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**35.000.000**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Paket	15.000.000		15.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Paket	20.000.000		20.000.000
Grand Total						**65.000.000**

Pulau Punjung, 1 April 2022

Kepala Pelaksana,

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ELDISON, ST

NIP. 19730712 200501 1 012

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Kecamatan Pulau Punjung

PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan **Kegiatan** : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa **Tujuan** : Persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang. Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang **Tahun 2021:** 64 org **Tahun 2022 :** 78 org Tahun 2021, dari 64 yang hadir, diikuti sebanyak 41 orang peserta laki-laki dan sebanyak 23 orang peserta perempuan. Tahun 2022, dari 78 orang yang hadir, diikuti sebanyak 51 orang peserta laki-laki dan sebanyak 27 orang peserta perempuan Dari notulen usulan musrenbang 2022	- **Partisipasi** : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang. - **Kontrol** : Dalam Musrenbang Peserta Perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya - **Manfaat :** Belum semua Peserta perempuan mengetahui manfaat dari Musrenbang. .	- Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang - Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari keterwakilan unsur perempuan yang disediakan - Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang -	- Kurangnya keinginan atau minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang - Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang - Adanya kesibukan lain dari calon peserta Musrenbang - Sosial budaya Minang Kabau dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat.	- Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 yang responsif gender.	- Mengumpulkan DURKP Nagari. - Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan. - Distribusi undangan ke nagari. - Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan musrenbang berjalan lancar. - Merekomendasi kan ke Bapppeda untuk membuat regulasi/kebijak an tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan	- Meningkatnya kehadiran peserta musrenbang dari berbagai unsur. - Tersusunnya usulan prioritas kecamatan. - Dari kehadiran tahun 2022 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan , perbandingannya laki-laki dan perempuan 71 % dan laki-laki 29 % - Tahun 2022, dari 78 orang yang hadir, diikuti sebanyak 51 orang peserta laki-laki dan sebanyak 27 orang peserta perempuan Dari notulen usulan musrenbang 2022 jumlah peserta laki-laki yang	**Output tahun 2023 :** Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 71 % menjadi 91 % serta peran usulan perempuan dari 29% menjadi 79%. **Outcome :** Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD yang responsif gender.

	jumlah peserta laki-laki yang diundang 61 orang, yang hadir 51 orang yang menyampaikan usulan sebanyak 46 orang (90 % dari jumlah peserta laki-laki yang hadir), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 27 orang dan yang menyampaikan usulan sebanyak 19 orang (65 % dari jumlah peserta perumpuan yang hadir)					musrenbang. - Melakukan sosialisasi internal tentang pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang.	diundang 61 orang, yang hadir 51 orang yang menyampaikan usulan sebanyak 46 orang (90 % dari jumlah peserta laki-laki yang hadir), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 27 orang dan yang menyampaikan usulan sebanyak 19 orang (65 % dari jumlah peserta perumpuan yang hadir)	

Camat Pulau Punjung

YULIUS, S.Sos.MM
Penata TK. I (III/d)
NIP 19670714 199803 1 006

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial,P3APPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL, AP.,M.Si NIP 19750225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos.M.T NIP 19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : ***KECAMATAN PULAU PUNJUNG***

TAHUN ANGGARAN : ***2023***

PROGRAM	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
KODE PROGRAM	7.01.03
KEGIATAN	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).** - Kegiatan musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya. - Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang. - Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang (Tahun 2021 sebanyak 64 orang serta tahun 2022 sebanyak 78 orang). - Pada Tahun 2021 dari 64 orang yang mengikuti kegiatan, terdapat 41 orang peserta laki-laki dan 23 orang peserta perempuan. - Pada Tahun 2022 dari 78 orang yang mengikuti kegiatan, terdapat 51 orang peserta laki-laki dan 27 orang peserta perempuan. - Dari notulen usulan musrenbang 2022 jumlah peserta laki-laki yang diundang 61 orang yang hadir 51 orang dan yang menyampaikan usulan sebanyak 46 orang (90%), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 27 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 19 orang (65%). **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Faktor Kesenjangan **Partisipasi :** Masih Banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan Musrenbang **Manfaat :** Belum semua Peserta perempuan mengetahui manfaat dari Musrenbang **Kontrol** : Dalam Musrenbang Peserta Perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya. b. Penyebab Internal - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang - Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari keterwakilan unsur perempuan yang disediakan - Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang c. Penyebab Eksternal - Kurangnya keinginan atau minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang

	- Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang - Adanya kesibukan lain dari calon peserta Musrenbang - Sosial budaya Minang Kabau dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat.		
CAPAIAN KEGIATAN	**Tolok Ukur** Meningkatnya peran pemberdayaan masyarakat yang responsif gender dalam menyampaikan usulan kegiatan musrenbang, sehingga perempuan dapat menyampaikan aspirasinya.		
	Indikator dan Target Kinerja **Output tahun 2023 :** Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 71 % menjadi 91 % serta peran usulan perempuan dari 29% menjadi 79%. **Outcome :** Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD yang responsif gender.		
RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan 1**	**Mengumpulkan DURKP Nagari**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Terkumpulnya DURKP Nagari
	Sub Kegiatan 2	**Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Tersusunnya data berdasarkan urutan prioritas
	Sub Kegiatan 3	**Distribusi undangan ke nagari**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 kegiatan
		Hasil	Tersebarnya undangan ke sasaran
	Sub Kegiatan 4	**Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 kegiatan
		Hasil	Terwujudnya kepastian kehadiran pihak terkait
	Sub	**Merekomendasikan ke Bapppeda untuk membuat regulasi/kebijakan**	

	Kegiatan 5	**tentang keikut sertaan perempuan dalam kegiatan musrebang**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Terlaksananya penyampaian usulan ke Bapppeda untuk membuat regulasi/kebijakan keikut sertaan perempuan dalam kegiatan musrenbang.
	Sub Kegiatan 6	**Melakukan sosialisasi internal tentang pentingnya keterwakilan perempuan di musrenbang**	
		Masukan	-
		Keluaran	1 Kegiatan
		Hasil	Terwujudnya kesadaran ke para perempuan, sehingga untuk kedepannya dapat berperan dalam musrenbang.
	Total anggaran		Rp 12.000.000,-

Pulau Punjung, Maret 2022

Camat Pulau Punjung

YULIUS, S.Sos.MM
Penata TK. I (III/d)
NIP 19670714 199803 1 006

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial,P3APPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA	ASRIL, AP.,M.Si	PARYANTO, S.Sos.M.T	BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
NIP.19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP. 19820521 200012 1 002

FORM KAK / TOR

Program		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Sasaran Program		Masyarakat Pulau Punjung
Kegiatan		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
Sub Kegiatan		• Mengumpulkan DURKP Nagari • Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan • Distribusi undangan ke nagari • Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar • Merekomendasikan ke Bapppeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikut sertaan perempuan dalam kegiatan musrebang • Melakukan sosialisasi internal tentang pentingnya keterwakilan perempuan di musrenbang
Latar Belakang	Dasar Hukum	• UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Permendagri No.86/2017 tentang TatacaranPerencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
	Gambaran Umum	• Dengan Musrembang Kecamatan diperoleh Prioritas usulan pembangunan Kecamatan berdasarkan hasil musrembang Nagari • Musrembang Kecamatan merupakan wadah dalam proses singkronisasi Perencanaan Pembangunan Nagari dan Kecamatan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	• Musrembang ditingkat nagari diawali dengan rembug jorong, musrembang Nagri menghasilkan dua dokumen RKP Nagari dan DURKP Nagari , RKP Nagari merupakan Dokumen Perencanaan kegiatan Pembangunan tahun berikutnya dan dituangkan kedalam Dokumen APBNagari. • DU RKPNagari disampaikan ke Kecamatan sebagai bahan musrembang tingkat Kecamatan.

	Indikator	• Meningkatnya peran serta musrembang Kecamatan baik peserta laki-laki dan perempuan mewakili dari unsur gender dengan perbangdingan 65% dan 35 %.
	Batasan Kegiatan	• Pada kegiatan Musrembang dibahas tentang Perencanaan Pembangunan Nagari di Kecamatan.
Maksud dan Tujuan		• Terwujudnya pencapaian visi dan misi Daerah • Singkronisasi dan sinergitas pembangunan • Terwujudnya keterkaitan dan singkronisasi perencanaan, angaran dan pelaksanaan • Mengobtimalkan partisipasi dari dunia usaha • Klasifikasi atas perioritas, kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi OPD
Cara Pelaksanaan Kegiatan		• Mengumpulkan dan merekap DU-RKP Nagari • Membentuk Panitia Musrembang kecamatan • Menentukan jadwal dan peserta yang diundang • Pelaksanaan musrembang: Pembangunan,Pembagian Kelompok, membuat rekapusulan yang disepakati yang di tuangkan dalam Berita Acara Musrembang • Menyampaikan hasil musrembang kecamatan ke Bapppeda untuk bahan Musrembang RKPD Kabupaten.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Wilayah Kecamatan Pulau Punjung
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Camat Pulau Punjung

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1
Mengatasi Kesenjangan Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan **KEGIATAN:** Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa **TUJUAN:** Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	**Data Pembuka Wawasan** Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang **Tahun 2020** : 135 org **Tahun 2021** : 80 org **Tahun 2022** : 80 org	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan **Akses :** ***Partisipasi :*** Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang ***Manfaat :*** Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	**Sebab Kesenjangan Internal** - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	**Sebab Kesenjangan Eksternal** Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang	**Reformulasi Tujuan** Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023yang responsif gender	**Rencana Aksi** Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	**Data Dasar *(Baseline)*** Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2022 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya lak-laki 61% dan perempuan 39%	**Indikator Gender** **Output :** Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 17 % menjadi 60 %, peran usulan perempuan dari 4 % menjadi 40 % **Outcome :** Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tahun 2021, dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 30 Orang peserta perempuan Tahun 2022, dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 49 orang peserta laki-laki dan 31 Orang peserta perempuan	**Kontrol** Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang - Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bapppeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 17 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3%	

Sungai Rumbai, 30 Maret 2022
Plt.CAMAT SUNGAI RUMBAI,

Drs. AGUSMAN IRWAN
NIP. 19640804 200801 1 001

TIM VERIFIKASI

Inspektur,	Kepala BKD,	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 1990909 1 001	ASRIL AP,Msi NIP. 19750225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER **(*GENDER BUDGET STATEMENT*)** **Mengatasi Kesenjangan Gender**			
SKPD **TAHUN ANGGARAN**	**: *KECAMATAN SUNGAI RUMBAI*** **: *2023***		
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
KODE PROGRAM	7.01.03		
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023yang responsif		
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).** Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya, Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang b. belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang c. Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang		
RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Mengumpulkan DURKP Nagari
		Alokasi Anggaran	1.000.000
	Komponen/ aktifitas 2	(Diambildari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan
		Alokasi Anggaran	13.000.000
	Total anggaran		Diisi dengan total anggaran untuk mencapai output
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender		

Sungai Rumbai, 30 Maret 2022
Plt. Camat Sungai Rumbai,

Drs. AGUSMAN IRWAN
NIP. 19640804 200801 1 001

Inspektur,	Kepala BKD,	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDI SUMANTO, CfrA	ASRIL AP,MSi	PARYANTO, S.Sos, MT	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP. 1968 1220 1990909 1 001	NIP. 19750225 199501 1 001	NIP. 19690609 198902 1 001	NIP. 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan**
Sasaran Program		**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan**
Kegiatan		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
Sub Kegiatan		**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa**
Latar Belakang	Dasar Hukum	Surat Bupati Dharmasraya No. 050/ /Bapppeda taggal 18 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2022
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Merumuskan Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari dan stakeholker terkait untuk merumuskan usulan prioritas musrenbang kecamatan dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Sungai Rumbai
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa Penanggung Jawab : Camat sungai Rumbai
Jadwal		Bulan Februari 2023
Biaya		Rp. 13.000.000,-

Sungai Rumbai,30 Maret 2022
Camat Sungai Rumbai,

Drs. Agusman Irwan
NIP. 19640804 200801 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2
Mengatasi Kesenjangan Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar *(Baseline)***	**Indikator Gender**
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat **TUJUAN:** Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Layanan Paten 2021 Non Disabilitas 850 org Disabilitas 9 orang	**Akses :** ***Partisipasi :*** Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas ***Manfaat :*** Mempercepat proses alur pelayanan **Kontrol** Memastikan Sarana dan Prasarana penunjang Disabilitas berfungsi dengan baik	- Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus	Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara	Terpenuhinya layananan untuk penyandang Disabilitas	Menyediakan Saran Prasarana bagi penyandang Disabilitas Mendahulukan layanan bagi penyandang Disabilitas	Meningkatnya keluarga yang membawa penyandang Disabilitas mengurus pelayanan Tingkat pelayanan PATEN tahun 2021 Non Disabilitas 98,9 % Disabilitas 1,0 %	**Output :** Meningkatnya penyandang disabilitas yang melakukan permohonan dokumen melalui PATEN Kecamatan **Outcome :** Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender

Sungai Rumbai, 30 Maret 2022
Plt.CAMAT SUNGAI RUMBAI,

Drs. AGUSMAN IRWAN
NIP. 19640401 200801 1 001

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD,	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 1990909 1 001	ASRIL AP,Msi NIP. 19750225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	BOBBY R. RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002

FORMAT GBS(2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(*GENDER BUDGET STATEMENT*)
Mengatasi Kesenjangan Gender

SKPD	**: *KECAMATAN SUNGAI RUMBAI***		
TAHUN ANGGARAN	**: *2023***		
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
KODE PROGRAM	7.01.02		
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
HASIL/OUTPUT	**Terpenuhinya layananan untuk penyandang Disabilitas**		
ANALISIS SITUASI	**3. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).** Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) **4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus c. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara		
RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Menyediakan Saran Prasarana bagi penyandang Disabilitas
		Alokasi Anggaran	2.000.000
	Komponen/ aktifitas 2	(Diambildari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Mendahulukan layanan bagi penyandang Disabilitas
		Alokasi Anggaran	1.600.000
	Total anggaran		
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender		

Sungai Rumbai, 30 Maret 2022
Plt. Camat Sungai Rumbai,

Drs. AGUSMAN IRWAN
NIP. 19640804 200801 1 001

Inspektur,	Kepala BKD,	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDI SUMANTO, CfrA	ASRIL AP,M.Si	PARYANTO, S.Sos, MT	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP. 1968 1220 1990909 1 001	NIP. 19750225 199501 1 001	NIP. 19690609 198902 1 001	NIP. 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Sasaran Program		**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**
Sub Kegiatan		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan**
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
	Gambaran Umum	Kebutuhan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Adanya Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	Indikator Kinerja	Jumlah layanan Non perizinan yang dikeluarkan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Langsung
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Sungai Rumbai
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan Penanggung Jawab : Camat Sungai Rumbai
Jadwal		Bulan Maret 2023
Biaya		Rp. 1.600.000,-

Sungai Rumbai, 30 Maret 2022
Camat Sungai Rumbai,

Drs. Agusman Irwan
NIP. 19640804 200801 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kesenjangan Gender antara Laki – Laki dan Perempuan

OPD : **Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan**

PROGRAM : **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** **Kegiatan:** **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** **Sub Kegiatan :** **Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro** **Tujuan :** **Terangkatnya Perekonomian**	Jika dilihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa pelaku usaha lebih didominasi oleh kaum perempuan, Maka dengan adanya kegiatan Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak tertutup kemungkinan kaum perempuan juga yang lebih banyak mengikuti pelatihan dan memiliki peran yang baik dan bahkan juga bisa berwirausaha agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terdiri dari 90 pelaku usaha dengan tiga tahapan yang terdiri dari 30 orang per tahapan. Sesuai dengan Data Jumlah Pelaku Usaha	**Akses:** - Pelaku usaha lebih banyak kaum perempuan **Partisipasi:** -Perempuan juga diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. **Control:** - Kurang nya pemahaman dalam mengaplikasikan jaringan Internet untuk pemasaran dan promosi. **Manfaat :** -Diharapkan Pembinaan dan pemberdayaan ini bermanfaat untuk semua pelaku usaha.	Kurangnya pengetahuan terhadap pengaplikasikan jaringan internet, sehingga bisa menghambat pada proses pemasaran barang yang akan di perjual belikan.	Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebaliknya ini hanya didominasi oleh laki-laki.	- Terangkatnya Perekonomian masyarakat melalui Sektor UMKM.	- Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 200,000,000,- untuk kegiatan tersebut - Memberikan penjelasan terhadap pelaku usaha cara-cara dalam pengelolaan dan manajemen UMKM yang sesuai dengan aturan.	- Dalam kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh 90 orang dari jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per tahapan. - Sementara itu diperkirakan yang akan menghadiri pemberdayaan UMKM ini hanya sekitar 87 orang jumlah keseluruhan kegiatan	**Input :** Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 **Output**: Hasilnya terciptanya para pelaku usaha yang paham dan kompeten dalam mengelola dan mengembangkan UMKM serta terciptanya Milineal Entrepreneur dan Woman Enterpreneur. **Outcome :** Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha dan perekonomian masyarakat jauh lebih maju, dan kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan terciptanya Milineal Entrepreneur dan Woman Enterpreneur.	yang aktif di Kab.Dharmasraya sebanyak 11424 orang, terdiri dari 4901 orang Laki-laki (42.9%) dan 6523 orang Perempuan (57.1%).							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja

Pulau Punjung, 28 Maret 2022

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19801115 200501 1 013

TIM VERIFIKASI ,

Inspektur	KEPALA BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDY SUMANTO,CfrA	**ASRIL, AP. M.Si**	**PARYANTO,S.Sos,M.T**	**BOBBY P RIZA,S.STP,M.Si**
NIP. 19681220 199009 1 001	**NIP.19750225 199501 1 001**	**NIP.19690609 198902 1 001**	**NIP.19820521 200012 1002**

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan**
TAHUN ANGGARAN : **2023**

PROGRAM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**
KEGIATAN	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, *Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***
KODE KEGIATAN	**02.17.07.2.01**
HASIL / OUTPUT	Pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan pelatihan dan fasilitasi kemitraan
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** Jika dilihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa pelaku usaha lebih didominasi oleh kaum perempuan, Maka dengan adanya kegiatan Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak tertutup kemungkinan kaum perempuan juga yang lebih banyak mengikuti pelatihan dan memiliki peran yang baik dan bahkan juga bisa berwirausaha agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terdiri dari 90 pelaku usaha dengan tiga tahapan yang terdiri dari 30 orang per tahapan. Sesuai dengan Data Jumlah Pelaku Usaha yang aktif di Kab.Dharmasraya sebanyak 11424 orang, terdiri dari 4901 orang Laki-laki (42.9%) dan 6523 orang Perempuan (57.1%).
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **Akses:** Pelaku usaha lebih banyak kaum perempuan **Partisipasi:** Perempuan juga diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. **Control:** Kurang nya pemahaman dalam mengaplikasikan jaringan Internet untuk pemasaran dan promosi. **Manfaat :** Diharapkan Pembinaan dan pemberdayaan ini bermanfaat untuk semua pelaku usaha. **b. Penyebab Internal** Kurangnya pengetahuan terhadap pengaplikasikan jaringan internet, sehingga bisa menghambat pada proses pemasaran barang yang akan di perjual belikan. **c. Penyebab Eksternal** Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebaliknya ini hanya didominasi oleh laki-laki.
RENCANA AKSI	- Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 200,000,000,- untuk kegiatan tersebut - Memberikan penjelasan terhadap pelaku usaha cara-cara dalam pengelolaan dan manajemen UMKM *yang sesuai dengan aturan.*
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Jumlah Dana sebesar Rp. 200.000.000,00
	2. Indikator dan Target Kinerja **Input :** Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 200.000.000,00 **Output**: Hasilnya terciptanya para pelaku usaha yang paham dan kompeten dalam mengelola dan mengembangkan UMKM serta terciptanya Milineal Entrepreneur dan Woman Enterpreneur. **Outcome :** Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha dan perekonomian masyarakat jauh lebih maju, dan kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)**

RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 untuk Kegiatan Pemberdayaan Usaha	
		Masukan	Rp. 200.000.000,00
		Keluaran	Kegiatan Pemberdayaan Usaha
		Hasil	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha dan perekonomian masyarakat jauh lebih maju, dan kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.

Pulau Punjung, 28 Maret 2022

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19801115 200501 1 013

VERIFIKASI KEGIATAN

Inspektur	KEPALA BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDY SUMANTO,CfrA	**ASRIL, AP. M.Si**	**PARYANTO,S.Sos,M.T**	**BOBBY P RIZA,S.STP,M.Si**
NIP. 19681220 199009 1 001	**NIP.19750225 199501 1 001**	**NIP.19690609 198902 1 001**	**NIP.19820521 200012 1002**

FORM KAK/ TOR

Program		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Sasaran Program		Peningkatan Pemberdayaan UMKM.
Kegiatan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UMKM.
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
	Gambaran Umum	Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UMKM.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelatihan ini akan diikuti oleh 90 orang peserta yang akan dibagi menjadi 3 tahapan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UMKM.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan pelatihan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang pelaku usaha sebanyak 90 orang untuk 3 kali angkatan pemberdayaan dan mendatangkan narasumber yang relevan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		PPTK Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2023
Biaya		Rp. 200 000.000,-

Pulau Punjung, 28 Maret 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19801115 200501 1 013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

Urusan	: Koperasi dan UKM	
Unit Organisasi	2.17.3.30.31.01	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Program	2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan	2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Sumber Pendanaan		APBD Kabupaten Dharmasraya 2023
Lokasi Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2023
Kelompok Sasaran		90 orang
Jumlah 2021		192.925.000,-
Jumlah 2022		**211.029.900,-**
Jumlah 2023		**200.000.000,-**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		**200.000.000,-**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	**BELANJA OPERASI**					**200.000.000**
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**					**200.000.000**
5.1.02.01	**BELANJA BARANG**					**41.958.000**
5.1.02.01.01	**BELANJA BARANG PAKAI HABIS**					**41.958.000**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas					**16.485.000**
	BBM Bensin	2100	Liter	7.850	0	16.485.000

	Spesifikasi : Pertamax Plus					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor					**14.220.000**
	ATK Pelatihan	90	Paket	75.000	0	6.750.000
	Cetak	90	Buku	55.000		4.950.000
	Cetak Spanduk	3	Paket	500.000		1.500.000
	Cetak foto	40	Lembar	3.000		120.000
	Cetak sertifikat anggota	90	lembar	10.000		900.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan cover	4	Rim	50.000		**200.000**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak					**3.840.000**
	Foto copy	12.800	lembar	300		3.840.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer					**913.000**
	Catrigt Printer hitam	1	Bh	300.000		300.000
	Catrigt Printer warna	1	Bh	305.000		305.000
	Tinta printer	4	btl	77.000		308.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan Natura					**6.300.000**
	Makan dan minum penunjang Kegiatan prasmana Nasi satu lauk	150	Bungkus	27.000	0	4.050.000
	Makan dan minum penunjang Kegiatan snack	150	Kotak	15.000	0	2.250.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**28.050.000**
5.1.02.02.01	**Belanja jasa Kantor**					**10.050.000**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Pembawa Acara dan Panitia					**9.600.000**
	Honorarium Narasumber	9	Orang/ keg	500.000		4.500.000
	Honorarium panitia	3 orang/jam/pelajaran	Orang/ keg	400.000		1.200.000
		3 orang /				

	Honor pejabat ess II	jam/pelajaran	Orang/jpl	500.000		1.500.000
	Honor ASN non esselon	12 orang / jam / pelajaran	Orang/ jpl	150.000		1.800.000
	Honor MC	3 orang/ *kegiatan*	Orang/keg	200.000		600.000
5.1.02.02.01.0007	Honor rohaniwan					**450.000**
	Pembaca Doa	3 org/keg	Orang /keg	150.000		450.000
5.1.02.02.12	**Belanja Khusus/ pelatihan,sosialisasi.bimtek serta pendidikan dan pelatihan**					**18.000.000**
5.1.02.02.12.0003	Belanja bimbingan teknis					18.000.000
	Uang saku	90	Org/keg	100.000		9.000.000
	Uang Transportasi	90	Org/keg	100.000		9.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**130.000.000**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					90.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					40.000.000
Grand Total						**200.000.000**

Pulau Punjung, 28 Maret 2022

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19801115 200501 1 013

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya**

PROGRAM : **Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : **Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** **Kegiatan :** **Pemberdayan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local** **Tujuan :** **Meningkatkankan penyediaan pangan masyarakat di tingkat rumah tangga**	- Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya 231.217Jiwa - Jumlah KWT yang terbentuk hingga Tahun 2022 adalah 125 kelompok - Kebutuhan Pangan Daerah untuk komoditi pangan local lebih besar dari yang di produksi dalam daerah - Konsumsi pangan yang sesuai dengan angka kecukupan gizi masih kecil jika di bandingkan dengan standar yang di tetapkan . - Fluktuasi Harga Pangan pokok < 10%	- **Keterbatasan masyarakat terutama ibu rumah tangga (Wanita) dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga** - **Kurangnya kreatifitas dan inovasi yang dapat dikemabangkan oleh masyarakat dalam rangka penyediaan pangan**	- Meningkatnya kebutuhan pangan keluarga - Kurangnya dana yang tersedia yang di butuhkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga	-Kurangnya stok / suplay pangan di pasar - Tinggginya harga pangan .	1. **Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pada tingkat rumah tangga** 2. **Meningkatkan penadapatan keluarga**	- Pemberdayaan Ibu rumah tangga dalam kelompok Wanita Tani (KWT) dalam kegiatan pekarangan pangan lestari - **Peningkatan Teknologi budidaya tanaman pekarangan**	- Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan keluarga - Jumlah produksi pangan pekarangan - Jumlah KWT yang aktiv pada tahun berajalan	Output : - Persentase Skor Pola Pangan Harapan - Produksi tanaman sayuran - KWT yang aktiv Outcome : Meningkatnya Konsumsi pangan masyarakat yang sesuai dengan Angka kecukupan Gizi

An. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIS

SARBAINI, S.A.P
NIP. 19670710 198903 1 010

TIM VERIFIKASI ,

Inspektur	KEPALA BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDY SUMANTO,CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	ASRIL, AP. M.Si NIP.19750225 199501 1 001	PARYANTO,S.Sos,M.T NIP.19690609 198902 1 001	BOBBY P RIZA,S.STP,M.Si NIP.19820521 200012 1002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya**
TAHUN ANGGARAN : **2023**

PROGRAM	**PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	
KEGIATAN	**Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local**	
KODE KEGIATAN	**2.09.03.2.04.02**	
HASIL / OUTPUT	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang diberdayakan	
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Kebutuhan Pangan yang beragam semakin meningkat dari waktu ke waktu yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk - Terbatasnya akses masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang diakibatkan oleh kelangkaan barang, kurangnya stock dan pasokan ataupun karena fluktuasi harga	
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **Akses:** Akses penyediaan pangan untuk konsumsi rumah tangga di dominasi oleh ibu rumah tangga sangat sulit karena terbatasnya kemampuan dalam penyediaan yang di sebabkan oleh stok/ pasokan yang kurang dan fluktuasi harga **Partisipasi:** - Kurangnya partisipasi laki-laki atas masalah ibu rumah tangga yang mengalami kesulitan penyediaan pangan keluarga **Control:** - **Manfaat :** *Anggapan bahwa urusan dapur dalam suatu rumah tangga adalah kewajiban perempuan* **b. Penyebab Internal** Kurangnya inovasi masyarakat dalam penyediaan pangan yang berasal dari lingkungan **c. Penyebab Eksternal** Rendahnya stok/pasokan pangan dan fluktuasi harga	
RENCANA AKSI	- Memberdayakan ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Wanita tani untuk mampu menyediakan pangan untuk kebutuhan rumah tangga yang berasal dari lingkunganan pekarangan	
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** Jumlah Dana sebesar Rp. 600.000.000,00	
	2. Indikator dan Target Kinerja **Input :** - Jumlah Dana sebesar Rp. 600.000.000 **Output:** - Jumlah KWT yang akan tumbuh dan berkembang sebantak 12 Kelompok **Outcome :** - Meningkatnya penyediaan pangan keluarga - Meningkatya konsumsi pangan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) .	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)**	
RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**	1. Membentuk Kelompok Wanita Tani yang akan terlibat dalam kegiatan

		2. Melakukan pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan untuk usaha dan pengembangan kelompok	
		Masukan	Rp. 600.000.000,00
		Keluaran	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari oleh KWT
		Hasil	1. Meningkatnya Konsumsi pangan sesuai AKG 2. Meningkatnya Produksi Pangan untuk komoditi tertentu 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Sikabau, 30 Maret 2022

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PANGAN DAN PERIKANAN DHARMASRAYA

SARBAINI, S.A.P

Nip. 19670710 198903 1 010

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Sasaran Program		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan
Kegiatan		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Sub Kegiatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2018 tetang Kemandirian Pangan Daerah 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022
	Gambaran Umum	1. Terlaksananya Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari 2. Terlaksananya Kegiatan Promosi Pangan Lokal 3. Terlaksananya Penyediaan Pangan Keluarga
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Memberdayakan masyarakar/Kelompok wanita tani tentang pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dal rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan masyarakat. 2. Memberdayakan usaha pangan lokal dan promosi pangan lokal. 3. Pemberian bantuan alat pengolahan hasil pasca panen berupa pangan lokal
	Indikator Kinerja	- Jumlah Masyarakat yang diberdayakan - Jumlah Promosi Pangan Lokal yang diikuti
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		1. Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga. 2. Mendukung Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumberdya lokal di Masyarakat 3. Meningkatnya pendapatan Kelompok Wanita Tani dan UMKM..
Cara Pelaksanaan Kegiatan		melakukan pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan untuk usaha dan pengembangan kelompok.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2023
Biaya		Rp. 600.000.000,-

Sikabau , 21 Juni 2022
KEPALA DINAS PANGAN
DAN PERIKANAN

PURWANTO, M.Pd
NIP. 19620805 198308 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya**

PROGRAM : **Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat **Kegiatan : Pemberdayan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local** **Tujuan : Meningkatkankan penyediaan pangan masyarakat di tingkat rumah tangga**	- Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya 231.217Jiwa - Jumlah KWT yang terbentuk hingga Tahun 2022 adalah 125 kelompok - Kebutuhan Pangan Daerah untuk komoditi pangan local lebih besar dari yang di produksi dalam daerah - Konsumsi pangan yang sesuai dengan angka kecukupan gizi masih kecil jika di bandingkan dengan standar yang di tetapkan . - Fluktuasi Harga Pangan pokok < 10%	- **Keterbatasan masyarakat terutama ibu rumah tangga (Wanita) dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga** - **Kurangnya kreatifitas dan inovasi yang dapat dikemabangkan oleh masyarakat dalam rangka penyediaan pangan**	- Meningkatnya kebutuhan pangan keluarga - Kurangnya dana yang tersedia yang di butuhkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga	-Kurangnya stok / suplay pangan di pasar - Tinggginya harga pangan .	1. **Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pada tingkat rumah tangga** 2. **Meningkatkan penadapatan keluarga**	- Pemberdayaan Ibu rumah tangga dalam kelompok Wanita Tani (KWT) dalam kegiatan pekarangan pangan lestari - **Peningkatan Teknologi budidaya tanaman pekarangan**	- Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan keluarga - Jumlah produksi pangan pekarangan - Jumlah KWT yang aktiv pada tahun berajalan	Output : - Persentase Skor Pola Pangan Harapan - Produksi tanaman sayuran - KWT yang aktiv Outcome : Meningkatnya Konsumsi pangan masyarakat yang sesuai dengan Angka kecukupan Gizi

An. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIS

SARBAINI, S.A.P
NIP. 19670710 198903 1 010

TIM VERIFIKASI ,

Inspektur	KEPALA BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDY SUMANTO,CfrA	ASRIL, AP. M.Si	PARYANTO,S.Sos,M.T	BOBBY P RIZA,S.STP,M.Si
NIP. 19681220 199009 1 001	NIP.19750225 199501 1 001	NIP.19690609 198902 1 001	NIP.19820521 200012 1002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

PROGRAM	**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	
KEGIATAN	**Penigkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu daerah Kabupaten/ Kota**	
KODE KEGIATAN	**3.25.06.2.2.03.1**	
HASIL / OUTPUT	- Jumlah Kelompok usaha budidaya ikan dan usaha pengolahan ikan yang berkembang	
ANALISA SITUASI	**3. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** - Konsusmsi ikan yang masih rendah jika dibandingkan dengan angka ideal yang dibutuhkan tubuh - Terbatasnya akses masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan ikan karena kurang tersedia dan harga yang cukup tinggi	
	4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **d. Faktor Kesenjangan** **Akses:** Tidak tersedianya ikan untuk di konsumsi yang ready to eat ready to cook **Partisipasi:** - **Control:** - **Manfaat :** Tidak terpenuhinya kebutuhan ikan konsumsi yang sesuai dengan yang ditetapkan **e. Penyebab Internal** *Kurangnya inovasi masyarakat dalam penyediaan ikan yang ready to eat dan readi to cook* **f. Penyebab Eksternal** - Tingginya harga ikan untuk konsumsi - Rendahnya ketersediaan ikan local	
RENCANA AKSI	- Meningkatkan ketersediaan ikan terutama ikan olahan sesuai dengan yang dibutuhkan	
CAPAIAN PROGRAM	**3. Tolak Ukur** Jumlah Dana sebesar Rp. 100.000.000,00	
	4. Indikator dan Target Kinerja **Input :** - Jumlah Dana sebesar Rp. 100.000.000 **Output:** - Jumlah Kelompok pengolahan ikan yang berkembang **Outcome :** - Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan - Meningkatnya Produksi Ikan segar dan ikan olahan	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	**Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)**	
RENCANA AKSI	***Kegiatan 1***	1. Mengembangkan kelompok usaha pengolahan ikan yang telah ada dan menumbuhkan usaha pengolahan ikan yang baru 2. Melakukan Sosialisasi manfaat makan ikan dan pemberian makanan berbahan ikan kepada Ibu Hamil dan anak-anak

		Masukan	Rp. 100.000.000,00
		Keluaran	Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari oleh KWT
		Hasil	1. Meningkatnya Konsumsi Ikan Daerah 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Sikabau, 30 Maret 2022

SARBAINI, S.A.P

Nip. 19670710 198903 1 010

FORM KAK/ TOR

Program		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sasaran Program		Terlaksananya Diversifikasi Olahan Ikan yang berdaya Saing
Kegiatan		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022
	Gambaran Umum	Tersedianya Ikan Konsumsi, Usaha Pengolahan Ikan dan terfasilitasinya gemarikan dan forikan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	-Mengembangkan kelompok usaha pengolahan ikan yang telah *ada dan menumbuhkan usaha pengolahan ikan yang baru* -Meningkatkan Konsumsi ikan yang masih rendah dibandingkan angka ideal yang dibutuhkan tubuh dengan cara mengadakan kegiatan Gemarikan dan Forikan
	Indikator Kinerja	- Jumlah Unit Usaha Perikanan yang berkembang - Fasilitasi Gemarikan dan Forikan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		-Meningkatkan Angka konsumsi Ikan -Meningkatkan Produksi Ikan Segar dan Ikan Olahan -Meningkatkan pendapatan usaha masyarakat pengolahan ikan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		-Melakukan Sosialisasi manfaat makan ikan dan pemberian makanan berbahan ikan kepada ibu hamil dan anak-anak -Melakukan *monitoring pada pelaku usaha pengolahan ikan* agar sesuai dengan prosedur.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Pangan dan Perikanan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Bidang Perikanan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perikanan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2023
Biaya		Rp. 100.000.000,-

Sikabau , ٢١ Juni 2022
KEPALA DINAS PANGAN
DAN PERIKANAN

PURWANTO, M.Pd
NIP. 19620805 198308 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise delivery)

OPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Progra m/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Kegiatan :** Pembentukan/P embinaan Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Kumuh **Tujuan :** Mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak	Penerima BSPS perempuan :250 RT dari 500 RT penerima (50%) Penerima BSPS laki-laki :372 RT dari 500 RT penerima (75%) TFL perempuan : 2 Org dari 12 TFL (5%) TFL laki-laki : 10 org dari 12 TFL (95%) DAK Perempuan: 14 Org dari 63 Org (25 %)	Pemanfaatan : untuk penerima BSPS, nama penerima bantuan banyak menggunakan nama pemilik tanah. Partisipasi : rekruitmen tenaga fasilitator lapangan banyak diikuti oleh laki-laki	faktor pemanfaat disebabkan karena aturan/juknis BSPS menyebutkan nama penerima bantuan adalah nama orang yang menguasai tanah (nama di sertifikat tanah)	Untuk penerima BSPS yang lebih antusias yaitu kaum ibu-ibu. Ibu-ibu lebih peduli terhadap keadaan rumah yang mereka huni saat ini. Untuk permasalahan tenang fasilitator lapangan didominasi laki-laki karena SDM mereka dianggap lebih mampu untuk terjun	Lebih menstimulasi masyarakat untuk bergerak dalam penyedian rumah layak huni serta mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni.	Melakukan sosialisasi terkait program BSPS kepada masyarakat	Penerima BSPS perempuan :250 RT dari 1.005 RT penerima (50%) Penerima BSPS laki-laki : 372 RT dari 1.005 RT penerima (75%) TFL perempuan : 2 Org dari 12 TFL (5%) TFL laki-laki : 10 org dari 12 TFL (95%) DAK Perempuan: 14 Org dari 63 Org (25 %)	Meningkatnya minat antusias masyarakat terhadap program BSPS.. Meningkatnya peran serta perempuan sebagai TFL lapangan.

Huni (RTLH) di Kabupaten Dharmasraya.	DAK laki-laki: 49 Org dari 63 Org (75%) *(kondisi th 2021)*			kelapangan.			DAK laki-laki: 49 Org dari 63 Org (75%) *(kondisi th 2021)*	

Pulau Punjung, 15 Juni 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA

Ir. MHD. AFIEI
NIP. 19640627 199303 1 005

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP.19681220 199009 1 001	Asril, AP.M.Si NIP.19750225 199501 1 001	Paryanto, S.Sos.M.T NIP.19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si NIP.19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD	**: DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
TAHUN ANGGARAN	**: 2022**
PROGRAM	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha
KODE PROGRAM	1.04. 1.04.01.01 . 23
KEGIATAN	Pembentukan/Pembinaan Ke lompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
HASIL/OUTPUT	menstimulasi masyarakat untuk bergerak dalam penyedian rumah layak huni
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).** • Penerima BSPS perempuan :250 RT dari 500 RT penerima (25%) • Penerima BSPS laki-laki : 372 RT dari 500 RT penerima (75%) • TFL perempuan : 2 Org dari 12 TFL (5%) • TFL laki-laki : 10 org dari 12 TFL (95%) (*kondisi tahun 2021*) **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Faktor Kesenjangan • Pemanfaatan **:** untuk penerima BSPS, nama penerima bantuan banyak menggunakan nama pemilik tanah. • Partisipasi **:** rekruitmen tenaga fasilitator lapangan banyak diikuti oleh laki-laki**.** b. Penyebab Internal faktor pemanfaat disebabkan karena aturan/juknis BSPS menyebutkan nama penerima bantuan adalah nama orang yang menguasai tanah (nama di sertifikat tanah) c. Penyebab Eksternal Untuk penerima BSPS yang lebih antusias yaitu kaum ibu-ibu. Ibu-ibu lebih peduli terhadap keadaan rumah yang

	mereka huni saat ini. Untuk permasalahan tenang fasilitator lapangan didominasi laki-laki karena SDM mereka dianggap lebih mampu untuk terjun kelapangan.		
RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**		
		Tujuan	Melakukan sosialisasi terkait program BSPS kepada masyarakat.
		Alokasi Anggaran	Rp. .....,-
	Total anggaran		Rp. .....,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Meningkatnya minat antusias masyarakat terhadap program BSPS. Meningkatnya peran serta perempuan sebagai TFL lapangan.		

Pulau Punjung, 15 Juni 2022

KEPALA DINAS,

Ir. MHD. AFIFI
Nip. 19640627 199303 1 005

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumantro, CfrA	Asril AP.M.Si	Paryanto, S.Sos.M.T	BOBBY P. RIZA, S.STP.M.Si
NIP. 19681220 199009 1 001	NIP. 19750225 199501 1 001	NIP. 19690609 198902 1 001	NIP. 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Pengembangan Perumahan
Sasaran Program		Terlaksananya Pembangunan Perumahan bagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah
Kegiatan		Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Sub Kegiatan		Meningkatkan penyediaan rumah layak yang terjangkau bagi MBR
Latar Belakang	Dasar Hukum	Permen PUPR No 7 Tahun 20178 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
	Gambaran Umum	Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pendampingan terhadap kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni
	Indikator Kinerja	Meniongkatkan penyediaan rumah tidak layak yang terjangkau bagi MBR
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Pendampingan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya yang dibiayai oleh APBN
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Rapat-rapat dan sosialisasi, ATK, dan Biaya Perjalanan Dinas untuk Pendampingan kegiatan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		PPTK
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2021
Biaya		Rp. 82.526.500, -

Pulau Punjung, 15 Juni 2022

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Ir. MHD. AFIFI

Nip. 19640627 199303 1 005

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise Delivery)

OPD : BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. DHARMASRAYA
TAHUN : 2023

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakytat **Kegiatan :** Administrasi Tata Pemerintahan **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah **Tujuan :** Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis	***Akses :*** *SPM merupakan salah satukebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan* ***Partisipasi:*** *Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal* ***Control:*** *Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kabupaten* ***Manfaat :*** • *Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan dasar yang disediakan*	• Kesulitan dalam meng-konversi SPM kedalam dokumen perencanaan • Kesadaran daerah untuk menempatkan SPM sebagai prioritas pembangunan (dalam perencanaan dan penganggaran)	• Masih multi tafsir atas konsep SPM sesuai UU 23/2014 • Kelengkapan data • Regulasi yang harmonis terkait penganggaran SPM (UU,PP, permanen)	SPM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara hidup sejahtera berdasarkan standar hidup minimal yang citetapkan	• Pengintegrasian SPM dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD,RKPD,Renstra, Renja SKPD) • Ketersediaan data • penghitungan kebutuhan • Penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar • Pelaksanaan pemenuhan • Kebijakan daerah	• Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan • Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia	**Out put** Tersusun laporan penerapan SPM Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 **Out come** Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM dengan target capaian 100%

	dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.	*oleh pemda untuk kesejahteraan masyarakat* • *Pemda akan memprioritaskan SPM* • *Menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat (masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik)*						

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

Kabag. Pemerintahan,

MARCO ANDRIAS, S.IP.,M.M.

NIP 19880603 200701 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial,P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA.	Asdi, AP, M.Si.	Paryanto, S.Sos,M.T.	Bobby P. Riza, S.STP,M.Si
NIP 19631220 198909 1 001	NIP 19750223 199601 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Bag. Pemerintahan dan Otda
TAHUN ANGGARAN : 2023

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="2">Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="2">4.01.02</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="2">Administrasi Tata Pemerintah</td></tr>
<tr><td>HASIL/OUTPUT</td><td colspan="2">- Tersedianya buku Laporan Penerapan SPM Tahun 2022
- Meningkatkan skor kinerja laporan penyelenggaraan Pemda</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ANALISA SITUASI</td><td colspan="2">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
- Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
Akses : SPM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan.
b. Penyebab Internal
- Kesulitan dalam meng-konversi SPM kedalam dokumen perencanaan.
- Kesadaran daerah untuk menempatkan SPM sebagai prioritas pembangunan (dalam perencanaan dan penganggaran).
c. Penyebab Eksternal
- Masih multi tafsir atas konsep SPM sesuai UU 23/2014
- Kelengkapan data
- Regulasi yang harmonis terkait penganggaran SPM (UU,PP, Permen)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">RENCANA AKSI</td><td>Komponen/ Aktifitas 1</td><td>Pengintegrasian SPM dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja PD)</td></tr>
<tr><td>Komponen/ Aktifitas 2</td><td>Ketersediaan data</td></tr>
<tr><td>Komponen/ Aktifitas 3</td><td>Penghitungan kebutuhan</td></tr>
<tr><td>Komponen/ Aktifitas 4</td><td>Penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar</td></tr>
<tr><td>Komponen/ Aktifitas 5</td><td>Pelaksanaan pemenuhan</td></tr>
<tr><td>Komponen/ Aktifitas 6</td><td>Kebijakan daerah</td></tr>
<tr><td>Rencana Anggaran</td><td>553.705.000,-</td></tr>
</table>

Capaian Program (level kegiatan)	**Out put** Tersusun laporan penerapan SPM Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 **Out come** Tercapai target pemenuhan SPM 100 persen

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

Kabag. Pemerintahan,

MARCO ANDRIAS, S.IP.,M.M.

NIP 19880603 200701 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial,P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA.	Asril, AP.,M.Si.	Paryanto, S.Sos,M.T.	Bobby P. Riza, S.STP,M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750228 199501 1 001	NIP 19690608 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sasaran Program		Laporan capaian SPM di OPD Pelaksana Pelayanan Dasar
Kegiatan		Administrasi Tata Pemerintahan
Sub Kegiatan		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayan Minimal Bidang Kesehatan.
	Gambaran Umum	Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disampaikan merupakan amanat dan kewajiban penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa Laporan Penerapan SPM disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyusunan Laporan Penerapan SPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
	Indikator Kinerja	Persentase capaian SPM urusan : 1. urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman; 5. urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, spm untuk urusan pemerintah ini diatur menjadi masing-masing menjadi 3 (tiga) sub urusan : a. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; b. sub urusan kebakaran; c. sub urusan bencana. 6. urusan pemerintahan bidang sosial.
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan Tujuan		Penyampaian laporan penerapan SPM juga akan menjadi bagian materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah pada Kementrian Dalam Negeri setiap tahunnya. Adapun laporan SPM dimaksud muatannya yaitu: Hasil Penerapan SPM, Kendala Penerapan SPM serta ketersediaan Anggaran dalam penerapan SPM. Hasil pelaporan SPM Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam : 1. Penilaian kinerja perangkat daerah; 2. Pengembangan kapsitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan

	pemenuhan pelayanan dasar; 3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	1. Penerapan 2. Pelaporan 3. Pembinaan 4. Pengawasan SPM
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas PUPR 4. Dinas Perkimtan 5. Dinas Sosial P3APPKB 6. Dinas Satpol PP dan Damkar 7. BPBD 8. Bag.Pemerintahan Setda (Pelaporan)
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan	Pelaksana :untuk laporan SPM berada dibagian Pemerintahan Setda Penanggung Jawab : Bupati Dharmasraya
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2023
Biaya	Rp. 74.429.500,-

Pulau Punjung, 20 Juni 2022

Kabag. Pemerintahan
Setda Kab.Dharmasraya,

MARCO ANDRIAS,S.IP.MM.
NIP 19880603 200701 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

OPD : **Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya**

PROGRAM : **Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan/Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik**

TAHUN : **2023**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan **Kegiatan :** Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.05 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan	**Akses:** Belum dipergunakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 dalam penyusunan dokumen perencanaan	- Kurangnya sosialisasi kebijakan Responsif Gender pada setiap tatanan - Kurangnya komitmen pengambil kebijakan dalam mewujudkan tatanan yang Responsif Gender - Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan belum terdapat mekanisme untuk memverifekasi dan	- Kurangnya dukungan pemerintah dalam mewujudkan tatanan/ kegiatan yang responsif gender - Terbatasnya isu-isu gender yang muncul saat tahapan penginputan data penerima sertifikasi	Perencanaan penerima sertifikasi yang responsif gender	- sosialisasi dan advokasi gender pada berbagai tatanan - Juknis verifekasi penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender	Penerima sertifikasi pendidik sebanyak 1270 orang terdiri dari 306 laki-laki dan 954 Perempuan yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan	**Program :** Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi data penerima sertifikasi **Kegiatan :** Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dari pemerintah pusat **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik **Input :** Dana untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Pendidik sebesar 59.368.707.180,-

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : -Terumuskannya RKPD Tahun 2023 yang Responsif Gender	Nasional - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	**Partisipasi:** Dalam Penginputan data penerima sertifikasi keterlibatan komponen seperti Kepala Sekolah, guru dan Tenaga Kependidikan belum optimal **Kontrol:** Yang berwenang dan para pengambil keputusan tentang kebijakan penerima sertifikasi masih belum memperhatikan kebutuhan gender **Manfaat :** Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam penerimaan sertifikasi	- mengakomodir isu kesetaraan gender					**Output:** Terlaksananya penerimaan sertifikasi oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan serta tercapainya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas **Outcomes :** Terlaksananya penerimaan sertifikasi oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan serta tercapainya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Dharmasraya,

MARIUS, S.Pd., M.M.
NIP 19641116 198802 1 002

Tim Verifekasi :

Inspektur	**Kepala BKD**	**Kepala Dinas BAPPPEDA**	**Kepala Dinas Sosial PPKB**
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA	**ASRIL,AP., M.Si**	**PARYANTO, S.Sos., M.T.**	**BOBY PERDANA RIZA,S.STP,M.Si**
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 20012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT

(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD	**: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA**		
TA	**: 2023**		
PROGRAM	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan		
KODE PROGRAM	1.01.04		
KEGIATAN	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik		
HASIL/OUTPUT	Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas		
ANALISIS SITUASI	**Data PembukaWawasan (Data Pilah Gender).** - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.05 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru **Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** Akses: Belum dipergunakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 dalam penyusunan dokumen perencanaan Partisipasi: Dalam Penginputan data penerima sertifikasi keterlibatan komponen seperti Kepala Sekolah, guru dan Tenaga Kependidikan belum optimal. Kontrol: Yang berwenang dan para pengambil keputusan tentang kebijakan penerima sertifikasi masih belum memperhatikan kebutuhan gender. Manfaat : Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam penerimaan sertifikasi. **Sebab Kesenjangan Internal** - Kurangnya sosialisasi kebijakan Responsif Gender pada setiap tatanan. - Kurangnya komitmen pengambil kebijakan dalam mewujudkan tatanan yang Responsif Gender. - Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan belum terdapat mekanisme untuk memverifekasi dan mengakomodir isu kesetaraan gender. **Sebab Kesenjangan Eksternal** - Kurangnya dukungan pemerintah dalam mewujudkan tatanan/ kegiatan yang responsif gender. - Terbatasnya isu-isu gender yang muncul saat tahapan penginputan data penerima sertifikasi.		
RENCANA AKSI	**Sub Kegiatan**	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	
		Tujuan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Dharmasraya Khususnya (Guru Laki-laki)
		AlokasiAnggaran	Rp. 59.368.707.180,-

CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terakomodirnya usulan kegiatan yang responsif gender dalam dokumen perencanaan

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Dharmasraya,

MARIUS, S.Pd.,M.M.
NIP 19641116 198802 1 002

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala BAPPPEDA	Kepala Dinas Sosial PPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL,AP., M.Si NIP 19730225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos.,M.T. NIP 19690609 198902 1 001	BOBY PERDANA RIZA,S.STP,M.Si NIP 19820521 20012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Sasaran Program		Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan		Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.05 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
	Gambaran Umum	Penerima sertifikasi pendidik sebanyak 1270 orang terdiri dari 306 laki-laki dan 954 Perempuan yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelatihan terdahap Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan serta dilaksanakannya Pendidikan Profesi Guru (PPG)
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Peningkatan Jumlah Penerima Tunjangan Sertifikasi bagi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan
	Batasan Kegiatan	Pelatihan dan temu teknis
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan jumlah Penerima Sertifikasi bagi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan khususnya laki-laki
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui Pendataan dan Pelatihan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 59.368.707.180,-

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Dharmasraya

MARIUS, S.Pd.,M.M.
NIP. 19641116 198802 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : **BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATN DHARMASRAYA**

PROGRAM : **EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**ISU GENDER**			**KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN**		**PENGUKURAN HASIL**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Basis Data (Base-Line)**	**Indikator Kinerja**
Program : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian **Kegiatan :** Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri - Pendirian Perusda BUMD Akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan	**Akses:** Para calon Direksi Perusda / BUMD di dominasi oleh kaum laki-laki **Partisipasi:** Masih kurangnya minat masyarakat khusus perempuan terhadap proses penyeleksian Direksi Perusda	- Masih kurangnya sosialisasi tentang pengumuman bagi para calon Direksi Perusda / BUMD Dharmasraya Mandiri - Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam menejerial untuk Perusda	- Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal kepemimpinan - Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan didalam mengambil	- Dengan terbentuk nya atau berdirinya Perusda / BUMD dapat meningkatkan PAD Kab. Dharmasraya - Adanya akses lapangan pekerjaan bagi masyaraka	- Melakukan rekrutmen bagi Direksi Perusda / BUMD akan adanya keterwakilan perempuan dalam posisi Direksi / BUMD - Menjalankan operasional usaha Perusda / BUMD	- Rapat-rapat undangan OPD terkait persyaratan bagi calon Direksi Perusda BUMD - Pelaksanaan seleksi Direksi Perusda BUMD Kab. Dharmasraya	- **Output:** Terfasilitasi nya perempuan persamaan Gender dengan adanya pemilihan Direksi Perusda / BUMD - **Outcome:** Meningkat nya partisip nya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**ISU GENDER**			**KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN**		**PENGUKURAN HASIL**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Basis Data (Base-Line)**	**Indikator Kinerja**
Tujuan : Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD serta akan menyerap tenaga kerja lokal - Adanya Seleksi untuk Direksi Perusda / BUMD Dharmasraya Mandiri	BUMD Dharmasraya Mandiri **Control:** Belum adanya mekanisme atau regulasi yang mengatur secara jelas terkait keikutsertaan perempuan dalam persyaratan Direksi Perusda / BUMD Dharmasraya Mandiri **Manfaat :** Meningkatnya pasrtisipasi perempuan didalam pencalonan Direksi / BUMD Dharmasraya	BUMD	keputusan, lebih cendrung mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada	- Mengembangkan potensi daerah	diberbagai bidang usaha diantaranya usaha PDAM, Pertashop dll -		perempuan persamaan Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		Mandiri						

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA,

SUPRATMAN, M, S.Pd.,M.Si
NIP 19650124 199703 1 001

Tim Verifikasi:

Inspektur	Kepala BKD	Kepala BAPPEDA	Kepala DINSOSP3APPKB,
Drs. Andysumanto, Cfra	**Asril, AP.,M.Si**	**Paryanto, S.Sos.,M.T**	**Bobby P. Riza, S.S.T.P.,M.Si**
NIP 19681220 1999009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Bag. Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kab.Dharmasraya
T.A : 2023

PROGRAM	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
KODE PROGRAM	4.01.03.2.01
KODE KEGIATAN	4.01.03.2.01.01
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** a. Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri; b. Pendirian Perusda BUMD Akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD; serta c. Akan menyerap tenaga kerja lokal.
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** 1. **Akses:** Para calon Direksi Perusda / BUMD di dominasi oleh kaum laki-laki. 2. **Partisipasi:** Masih kurangnya minat masyarakat khusus perempuan terhadap proses penyeleksian Direksi Perusda BUMD Dharmasraya Mandiri. 3. **Kontrol:** Belum adanya mekanisme atau regulasi yang mengatur secara jelas terkait keikutsertaan perempuan dalam persyaratan Direksi Perusda / BUMD Dharmasraya Mandiri 4. **Manfaat:** Meningkatnya pasrtisipasi perempuan didalam pencalonan Direksi / BUMD Dharmasraya Mandiri **b. Penyebab Internal** 1. Masih kurangnya sosialisasi tentang pengumuman bagi para calon Direksi Perusda / BUMD Dharmasraya Mandiri; 2. Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam menejerial untuk Perusda BUMD. **c. Penyebab Eksternal** 1. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal kepemimpinan; 2. Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan didalam mengambil keputusan, lebih cendrung mengandalkan perasaan dari pada fakta yang ada
CAPAIAN PROGRAM	**1. Tolak Ukur** a. Rapat-rapat undangan OPD terkait persyaratan bagi calon Direksi Perusda BUMD; b. Pelaksanaan seleksi Direksi Perusda BUMD Kab. Dharmasraya.

	2. Indikator dan Target Kinerja a. **Output:** Terfasilitasinya perempuan / persamaan Gender dengan adanya pemilihan Direksi Perusda / BUMD. b. **Outcome:** Meningkatnya partisipasinya perempuan / persamaan Gender		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 106.569.263,-		
RENCANA AKSI RENCANA AKSI	**Kegiatan 1**		
		Masukan	Rp. 106.569.263,-
		Keluaran	Pengumuman untuk para calon Direksi Perusda / BUMD
		Hasil	Melakukan rekrutmen bagi Direksi Perusda / BUMD akan adanya keterwakilan perempuan dalam posisi Direksi / BUMD
	Kegiatan 2		
		Masukan	Rp. Rp. 106.569.263,-
		Keluaran	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		Hasil	Menjalankan operasional usaha Perusda / BUMD diberbagai bidang usaha diantaranya usaha PDAM, Pertashop dll

Pulau Punjung, Maret 2022

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA,

SUPRATMAN, M. S.Pd.,M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19650124 199703 1 003

Tim Verifikasi:

Inspektur,	**Kepala BKD,**	**Kepala BAPPEDA,**	**Kepala DINSOSP3APPKB,**
Drs. Andysumanto, Cfra	**Asril, AP., M.Si**	**Paryanto, S.Sos., M.T**	**Bobby P. Riza, S.S.T.P.,M.Si**
NIP 19681220 1999009 1 001	NIP 19750225.199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Sasaran Program		OPD terkait Persyaratan Bagi Calon Direksi Perusda BUMD
Kegiatan		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Sub Kegiatan		Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
Latar Belakang	Dasar Hukum	Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Dharmasraya Mandiri
	Gambaran Umum	Pendirian Perusda BUMD Akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD serta akan menyerap tenaga kerja lokal
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melakukan seleksi, Sosialisasi, Peningkatan PAD
	Indikator Kinerja	Terpilihnya Direksi Perusda Meningkatkan PAD
	Batasan Kegiatan	- Terpilihnya Direksi - Sosialisasi, terbuka peluang/partisipasi perempuan - PAD, adanya penyerapan tenaga kerja lokal
Maksud dan Tujuan		Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui rapat-rapat, sosialisasi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Bagian Perekonomian dan SDA, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perekonomian dan BUMD Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2023
Biaya		Rp. 106.569.263,-

Pulau Punjung, Maret 2022

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SDA,

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA SETDA

SUPRATMAN. M, S.Pd.,M.Si
NIP 19650124 199703 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PERTANIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama:Kebijakan/Program/ Kegiatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar *(Baseline)*	Indikator Gender
PROGRAM : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN **KEGIATAN:** Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain **TUJUAN:** Terwujudnya peningkatan jumlah populasi sapi unggu	- Jumlah penduduk Dharmasraya. - Populasi ternak - SDM peternak yang masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas - Realisasi akseptor IB untuk mendukung kegiatan UPSUS SIWAB	Akses Akses lokasi untuk melakukan IB berbeda-beda. Kebanyakan yang meminta bantuan untuk dilakukakan IB adalah peternak yang tinggal di tempat yang sulit akses transportasi dan medan yang cukup sulit untuk dilewati. - Partisipasi Untuk saat ini perempuan juga memiliki peran serta dalam	Laki-laki mempunyai waktu luang dan jangkauan akses yang lebih fleksibel dibandingkan perempuan. - Sarana dan fasilitas IB untuk perempuan masih belum memadai. - Adanya pemahaman bahwa tugas perempuan adalah mengurus pekerjaan rumah	- Jam operasional untuk melakukan IB untuk kaum laki-laki lebih banyak dan tidak terbatas sementara perempuan memiliki akses yang terbatas. - Pola pikir masyarakat bahwa yang mencari nafkah adalah laki-	Me- Meningkatkan jumlah populasi sapi unggul melalui inseminasi buatan yang berbasis responsif gender.	Melaksanakan kegiatan Inseminasi Buatan di 11 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan IB	- Populasi ternak sapi pada tahun - Untuk tahun 2021 ada 2 kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya genetik hewan melalui inseminasi buata	Output: 1. Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan di 11 kecamatan Kabupaten Dharmasraya 2. Terlaksananya kegiatan monev inseminasi buatan Outcame: Meningkatnya produksi

		pelaksanaan inseminasi buatan. - Kontrol Biasanya yang dilibatkan dalam kegiatan inseminasi buatan di Kabupaten Dharmasraya dilakukan oleh petugas laki-laki. Manfaat Petugas IB perempuan bisa membantu kegiatan peningkatan sumber daya genetik.	tanggga.	laki sehingga dianggap perempuan tidak perlu melakukan IB.				peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui inseminasi buatan dengan memperhatikan keamanan dan kemudahan akses bagi petugas IB yang berbasis responsif gender

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pertanian

DARISMAN, SSi, MM
NIP. 19750217 200003 1001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSP3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP. 19681220 199009 1 001	ASRIL, AP., M.Si NIP. 19750225 199501 1 001	Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(*GENDER BUDGET STATEMENT*)

SKPD : ***DINAS PERTANIAN***
TAHUN ANGGARAN : ***2023***

PROGRAM	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
KODE PROGRAM	**3**	**27**	**02**
KEGIATAN	– Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
HASIL/OUTPUT	Layanan Inseminsai		

ANALISIS SITUASI

1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).

- Jumlah penduduk Dharmasraya.
- Populasi ternak
- SDM peternak yang masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Realisasi akseptor IB untuk mendukung kegiatan UPSUS SIWAB

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

Akses :

Akses lokasi untuk melakukan IB berbeda-beda. Kebanyakan yang meminta bantuan untuk dilakukakan IB adalah peternak yang tinggal di tempat yang sulit akses transportasi dan medan yang cukup sulit untuk dilewati.

Partisipasi

Untuk saat ini perempuan juga memiliki peran serta dalam pelaksanaan inseminasi buatan. - Kontrol Biasanya yang dilibatkan dalam kegiatan inseminasi buatan di Kabupaten Dharmasraya dilakukan oleh petugas laki-laki.

Manfaat

Petugas IB perempuan bisa membantu kegiatan peningkatan sumber daya genetik.

RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**	Melaksanakan kegiatan Inseminasi Buatan di 11 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan IB	
		Tujuan	Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan di 11 kecamatan Kabupaten Dharmasraya
		Alokasi Anggaran	Rp. 150.000.000,-
	Total anggaran		Rp. 150.000.000,-

CAPAIAN PROGRAM	Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan di 11 kecamatan Kabupaten Dharmasraya

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya

DARISMAN, SSi, MM
NIP. 19750217 200003 1001

VERIFIKASI KEGIATAN

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSP3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA	**ASRIL, AP., M.Si**	**Paryanto, S.Sos, M.T**	**Bobby P. Riza, S.STP, M.Si**
NIP. 19681220 199009 1 001	**NIP. 19750225 199501 1 001**	**NIP. 10690609 198902 1 001**	**NIP. 19820521 200012 1 002**

FORM KAK/ TOR

Program		**Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**
Sasaran Program		Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya
Kegiatan		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Inseminasi Buatan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Permentan Nomor 18 Tahun 2009
	Gambaran Umum	**Meningkatkan jumlah populasi sapi unggul melalui inseminasi buatan yang berbasis responsif gender.**
Kegiatan	Uraian Kegiatan	
	Indikator Kinerja	Jumlah Inseminasi Yang dilakukan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan jumlah populasi sapi unggul melalui inseminasi buatan yang berbasis responsif gender.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Di Kandang Peternak
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Puskeswan **Penanggung Jawab :** Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jadwal		Bulan Februari 2022
Biaya		Rp. 150.000.000,-

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya

DARISMAN, SSi, MM
NIP. 19750217 200003 1001

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSP3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA **NIP. 19681220 199009 1 001**	**ASRIL, AP., M.Si** **NIP. 19750225 199501 1 001**	**Paryanto, S.Sos, M.T** **NIP. 10690609 198902 1 001**	**Bobby P. Riza, S.STP, M.Si** **NIP. 19820521 200012 1 002**

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Program PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar *(Baseline)***	**Indikator Gender**
Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tujuan : Jumlah Petani/Kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah petani Jumlah penyuluh Kelompok tani Kelompok wanita tani(KWT)	Akses: dampingan yang diberikan antara perempuan dan laki-laki Partisipasi: tidak seluruh petani yang mendapatkan dampingan Control: dampingan yang di berikan	SDM tidak mencukupi Jumlah kelompok tani dan dan kelompok wanita tani	Tingkat Antusias masyarkat	Peningkatan Produksi dan Produkstivitas Pertanian/Perkebunan Meningkatkan fungsi kelembagaan petani	Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani	Jumlah petani Jumlah penyuluh Kelompok tani	Jumlah penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi

		Manfaat : dengan penyuluhan dan dampingan yang diberikan bisa meningkatkan produksi						
		-				-		

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya

DARISMAN, SSi, MM
NIP. 19750217 200003 1001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSP3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CPrA **NIP. 19681220 199009 1 001**	**ASRIL, AP., M.Si** **NIP. 19750225 199501 1 001**	**Paryanto, S.Sos, M.T** **NIP. 10690609 198902 1 001**	**Bobby P. Riza, S.STP, M.Si** **NIP. 19820521 200012 1 002**

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(*GENDER BUDGET STATEMENT*)

SKPD : ***DINAS PERTANIAN***
TAHUN ANGGARAN : ***2023***

PROGRAM	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
KODE PROGRAM	3 27 07 2.01 01
KEGIATAN	Jumlah Petani/Kelompok tani yang meningkat kapasitasnya
HASIL/OUTPUT	Peningkatan Produksi dan Produkstivitas Pertanian/Perkebunan Meningkatkan fungsi kelembagaan petani
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).** ➢ Jumlah petani ➢ Jumlah penyuluh ➢ Kelompok tani ➢ Kelompok wanita tani(KWT) **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Faktor Kesenjangan Akses: dampingan yang diberikan antara perempuan dan laki-laki Partisipasi: tidak seluruh petani yang mendapatkan dampingan Control: dampingan yang di berikan Manfaat : dengan penyuluhan dan dampingan yang diberikan bisa meningkatkan produksi b. Penyebab Internal SDM tidak mencukupi Jumlah kelompok tani dan dan kelompok wanita tani **c.** Penyebab Eksternal Tingkat Antusias masyarkat

RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**	Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani	
		Tujuan	Diisi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender
		Alokasi Anggaran	Rp. 680.000.000,-
	Total anggaran		Rp. 680.000.000,-

CAPAIAN PROGRAM	Jumlah penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya

DARISMAN, SSi, MM
NIP. 19750217 200003 1001

VERIFIKASI KEGIATAN

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSP3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA **NIP. 19681220 199009 1 001**	**ASRIL, AP., M.Si** **NIP. 19750225 199501 1 001**	**Paryanto, S.Sos, M.T** **NIP. 10690609 198902 1 001**	**Bobby P. Riza, S.STP, M.Si** **NIP. 19820521 200012 1 002**

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penyuluhan Pertanian
Sasaran Program		Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya
Kegiatan		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Latar Belakang	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.
	Gambaran Umum	Peningkatan pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya dengan menumnuh kembangkan usaha taninya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	
	Indikator Kinerja	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian
Cara Pelaksanaan Kegiatan		
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Di kelompok Tani masing-masing nagari
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan **Penanggung Jawab :** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
Jadwal		Bulan Februari 2022
Biaya		Rp. 680.000.000,-

Pulau Punjung, Maret 2022
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Dharmasraya

DARISMAN, SSi, MM
NIP. 19750217 200003 1001

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSP3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA **NIP. 19681220 199009 1 001**	**ASRIL, AP., M.Si** **NIP. 19750225 199501 1 001**	**Paryanto, S.Sos, M.T** **NIP. 10690609 198902 1 001**	**Bobby P. Riza, S.STP, M.Si** **NIP. 19820521 200012 1 002**

service delivery

MATRIK *GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)*
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (*SERVICE DELIVERY*)

OPD : RSUD SUNGAI DAREH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan**		**Monitoring**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**RencanaAksi**	**Data Dasar *(Baseline)***	**Indikator Gender**
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat **Kegiatan :** Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota **Sub Kegiatan:** Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 2. Jumlah kunjungan pasien : a. Rawat Inap Tahun 2021 Laki-laki 2.922 orang dan perempuan 3.765 orang b. Rawat Jalan Tahun 2021 laki-laki 15.570 orang dan perempuan 20.222 orang	**Akses :** Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana **Manfaat :** Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselmatan pasien di rumah sakit **Partisipasi :** Seluruh pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	1. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung Belum adanya survey yang memuat indikator pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	1. Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender 2. Masyarakat belum memahami konsep gender	Peningkatan mutu pelayanan, dengan menyediakan sarana yang responsif gender	Pemeliharaan gedung rumah sakit	Jumlah kunjungan pasien rawat inap : a. Rawat Inap Tahun 2021 Laki-laki 2.922 orang dan perempuan 3.765 orang b. Rawat Jalan Tahun 202015.570 orang dan perempuan 20.222 orang	**Output :** Terlaksananya pemasangan Closed duduk untuk pasien rawat inap Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP

Pekerjaan : Pemeliharaan Rutin Gedung RS **Tujuan :** Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit		**Kontrol :** Pemahaman dan kesadaran manajemen rumah sakit belum optimal.						**Outcome :** Meningkatnya keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh

Pulau Punjung, April 2022

DIREKTUR RSUD SUNGAI DAREH

Drg. Chusnul Chotimah Subekti, MPH
NIP.19730412 200312 2 005

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL, AP, M.Si NIP 19750225 199501 100	Paryanto, S.Sos,M.T NIP 19690609 198902 1 001	Bobby P. Riza, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT **(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)** **SKPD** : **RSUD Sungai Dareh** **TAHUN ANGGARAN** : **2023**	
PROGRAM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	1.02.02
KEGIATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya pemasangan Closed duduk di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP
ANALISIS SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).** 1. Salah satu indikator penilaian Akreditasi rumah sakit adalah indikator keselamatan pasien, yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keselamatan pasien. 2. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 3. Jumlah kunjungan pasien 2021: a. Rawat Inap Tahun 2021 : laki-laki 2.922 orang dan perempuan 3.765 orang b. Rawat Jalan Tahun 2021 : laki-laki 5.570 orang dan perempuan 20.222 orang **2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender** a. Faktor Kesenjangan Dengan belum tersedianya sarana untuk pasien geriatri dan pasien disabilitas akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut : <u>Akses</u> : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana <u>Manfaat</u> : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di rumah sakit b. Penyebab Internal 1. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung 2. Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan c. Penyebab Eksternal 1. Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender 2. Masyarakat belum memahami konsep gender

RENCANA AKSI	**Komponen/ Aktifitas 1**		
		Tujuan	pemasangan Closed duduk di toilet pasien rawat inap
		Alokasi Anggaran	**Rp.125.000.000,-**
	Komponen/ aktifitas 2		
		Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		**Rp. 125.000.000,-**
CAPAIAN PROGRAM	Output : Terlaksananya pemasangan Closed duduk di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP Outcome : Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh		

Punjung, 1 April 2022

DIREKTUR RSUD SUNGAI DAREH

Drg. Chusnul Chotimah Subekti, MPH
NIP.19730412 200312 2 005

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Banppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs. Andy Sunfanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL, AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S.Sos,M.T NIP 19690609 198902 1 001	Bobby P. Riza, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi
Kegiatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
LatarBelakang	DasarHukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahS akit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
	GambaranUmum	Subkegiatan operasional pelayanan rumah sakit dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Gedung RS dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan	UraianKegiatan	pemasangan Closed duduk di toilet pasien rawat inap
	IndikatorKinerja	Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh
	BatasanKegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat perencanaan kegiatan dan pemasangan Closed duduk di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		RSUD Sungai Dareh.
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan		Pelaksana : PPTK pekerjaan pemeliharaan rutin rumah sakit. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sungai Dareh
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		**Rp. 125.000.0000,-**

Punjung, 1 April 2022

DIREKTUR RSUD SUNGAI DAREH

Drg. Chusnul Chotimah Subekti, MPH

NIP.19730412 200312 2 005

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

Urusan	**:**	
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Program	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit
Sumber Pendanaan		BLUD
Lokasi Kegiatan		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2023
Kelompok Sasaran		
Jumlah 2022		**Rp. 125.000.0000,-**
Jumlah 2023		
Jumlah 2024		

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah

Punjung, 1 April 2022
DIREKTUR RSUD SUNGAI DAREH

Drg. Chusnul Chotimah Subekti, MPH
NIP.19730412 200312 2 005

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise delivery)

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum **Kegiatan :** Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan :** Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan. Siswa yang terjaring kedapatan merokok Adanya laporan masyarakat tentang siswa yang berkeliaran pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap lem.	***Akses :*** *Masih kurangnya manfaat Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP pelajar laki-laki dibandingkan dengan pelajar perempuan.* ***Partisipasi:*** *Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat tentang penyakit dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum* ***Control:*** *Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.* *Manfaat :* *Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang*	• Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM. • Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender	• Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Patroli Satpol PP • Masih kurangnya Pengawsan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah • Peraturan sekolah tentang kedisiplinan siswa • Kurangnya peran masyarakat tentang pengawasan bersama terhadap anak sekolah	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki 2. Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp	Berkurangnya Pelajar laki-laki yang berkeliaran pada jam pelajaran	**Out put** - Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran - Anggaran Rp. 121.431.750 **Output :** Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan **Out Come :** Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengamanan, dan Pengawalan **Tujuan :** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		*bahaya penyakit masyarakat*						

Pulau Punjung, April 2022

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

(SAFRUDIN, S.Sos., M.Si)
NIP. 19750618 200604 1 004

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CHA NIP 19681220 199009 1 001	Asril, AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(PernyataanAnggaran Gender)

SKPD : **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="3">Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="3">1.05.02</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="3">Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</td></tr>
<tr><td>HASIL/OUTPUT</td><td colspan="3">Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ANALISA SITUASI</td><td colspan="3">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan.
Siswa yang terjaring kedapatan merokok Adanya laporan masyarakat tentang siswa yang Berkeliaran pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap lem.</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
a) Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP lebih banyak bermanfaat bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
b) Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat tentang penyakit dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum
c) Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.
d) Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang bahaya penyakit masyarakat
b. Penyebab Internal
a) Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM
b) Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender
c. Penyebab Eksternal
a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Patroli Satpol PP
b) Masih kurangnya Pengawsan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah</td></tr>
<tr><td rowspan="5">RENCANA AKSI</td><td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td><td colspan="2">Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Agar pelajar laki-laki tidak berkeliaran pada jam pelajaran</td></tr>
<tr><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Komponen/ Aktifitas 2</td><td colspan="2">Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Memberikan efek jera kepada pelajar yang berkeliaran pada jam pelajaran</td></tr>
</table>

		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	**121.431.750**	
Capaian Program	**Out put** Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran **Out come** Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		

Pulau Punjung, April 2022

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

(SAFRUDIN, S.Sos., M.Si)
NIP. 19750819 200604 1 004

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	KepalaDinasSosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA	Asril, AP, M. Si	Paryanto, S. Sos, M.T	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Terlaksananya Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomo1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Gambaran Umum	Patroli Rutin dan Pengamanan Kegiatan Daerah dan Masyarakat
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Indikator Kinerja	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan Patroli pada tempat-tempat yang diindikasikan adanya Gangguan Trantibum
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Patroli, Sosialisasi dan Pengamanan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Wilayah Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, PelaksanaanPatroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penanggung Jawab : Kepala Satpol PP dan Damkar
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 121.431.750

Pulau Punjung, April 2022

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

(SAFRUDIN, S.Sos., M.Si)
NIP. 19750819 200604 1 004

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

Urusan	:	
Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satpol PP dan Damkar
Sub Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satpol PP dan Damkar
Program	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Sumber Pendanaan		
Lokasi Kegiatan		
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2022
Kelompok Sasaran		
Jumlah 2021		
Jumlah 2022		**121.431.750**
Jumlah 2023		

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		**121.431.750**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					**121.431.750**
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					**113.931.750**
5.1.02.01.01	BELANJA BARANG PAKAI HABIS					**29.951.750**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas					**18.951.750**

	BBM Bensin Spesifikasi : Dexlite	2.000	liter	10.200	0	20.400.000
5.1.02.01.01.0052	Makan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	520	bungkus	22.000		11.000.000
5.1.02.04	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					83.980.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Modal Software					7.500.000
Grand Total						**121.431.750**

Pulau Punjung, April 2022
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

(SAFRUDIN, S.Sos., M.Si)
NIP. 19750819 200604 1 004

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INOVASI *SIAMPUH* DPMPTSP DHARMASRAYA

OPD : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

PROGRAM : **Program Pelayanan Penanaman Modal**

TAHUN : **2023**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Pelayanan Penanaman Modal **Kegiatan :** Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah aparatur atau pengelola pelayanan perizinan Tersedianya fasilitas pelayanan perizinan yang memadai yang responsive gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas	**Akses: Masih** Kurangnya fasilitas pelayanan perizinan yang responsif gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas **Partisipasi:** Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha.	- kurangnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan - Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait maupun dengan pengelola pelayanan perizinan di tingkat propinsi	- Koordinasi lintas sector yang masi belum optimal	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan perizinan	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur atau pengelola pelayanan perizinan dengan cara mengalokasikan dana untuk mengikuti pelatihan dan bimtek baik yang diadakan oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). -	Tercapainya Target izin yang telah di rencanakan	Input : Melakukan sharing atau study banding ke daerah yang sudah mendapat predikat terbaik dalam hal pelayanan perizinan agar dapat menyerap ilmunya untuk diterapkan di Kab. Dharmasraya. Output : Meningkatnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan

Tujuan : Penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu		**Kontrol :** meningkatanya pengetahuan tentang perizinan bagi masyarakat atau pelaku usaha.						

Pulau Punjung, April 2022

KEPALA DINAS PMPTSP

NALDI, S.STP,M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	ASRIL,AP.,M.Si NIP 19750225 199501 1 001	H. PARYANTO, S.Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(PernyataanAnggaran Gender)
INOVASI *SIAMPUH* DPMPTSP DHARMASRAYA

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN ANGGARAN : 2023

PROGRAM	*Program Pelayanan Penanaman Modal*
KODE PROGRAM	2.18.04
KEGIATAN	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
HASIL/OUTPUT	Penerbitan Dokumen Perizinan Dan NonperizinanTerpadu
ANALISA SITUASI	**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)** *Jumlah aparatur atau pengelola pelayanan perizinan* Tersedianya fasilitas pelayanan perizinan yang memadai yang responsive gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender **a. Faktor Kesenjangan** **Akses** • Masih Kurangnya fasilitas pelayanan perizinan yang responsif gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas **Partisipasi** • Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha. **Kontrol** • Meningkatanya pengetahuan tentang perizinan bagi masyarakat atau pelaku usaha. **b. Penyebab Internal** • kurangnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan • Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait maupun dengan pengelola pelayanan perizinan di tingkat propinsi **c. Penyebab Eksternal** • Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak ukur Jumlah dana Rp. 60.099.100
	2. Indikator dan target kinerja <u>Input</u> Dana yang diusulkan sebesar Rp. 60.099.100 <u>Output</u> Meningkatnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan <u>Outcome</u> Terlaksananya sharing atau study banding ke daerah yang sudah mendapat predikat terbaik
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 60.099.100

RENCANA AKSI	**Kegiatan**	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur atau pengelola pelayanan perizinan dengan cara mengalokasikan dana untuk mengikuti pelatihan dan *bimtek baik yang diadakan oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman* Modal (BKPM).
		Tujuan: Tercapainya Target izin yang telah di rencanakan
	Indikator Output	Meningkatnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan

Pulau Punjung, April 2022

KEPALA DINAS PMPTSP

NALDI. S.STP.,M.Si.
RembinaTk.I (IV/b)
NIP 19820411200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs.ANDY SUMANTO, CfrA	ASRIL,AP.,M.Si	H. PARYANTO, S.Sos, M.T	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pelayanan Penanaman Modal
Sasaran Program		Pelaku Usaha
Kegiatan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. PP No 24 Tahun 2018 2. PP No 5 Tahun 2021 3. Perbub No 110 Tahun 2018 4. Perbub No 6 Tahun 2020
	Gambaran Umum	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, *transparan, pasti dan terjangkau*
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	Indikator Kinerja	Terbitnya Perizinan dan Nonperizinan Sesuai Ketentuan
	Batasan Kegiatan	Pada kegiatan Perizinan ini yaitu Terlaksananya pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu. Dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu meliputi verfikasi dan validasi perzinan, pemrosesan dan penetapan perizinan serta penerbitan dan dokumen perizinan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan akses dan mutu pelayanan perizinan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui Pelayanan Perizinan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi *secara Elektronik* Penanggung Jawab : Kepala Dinas DPMPTSP
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2022
Biaya		Rp. 60.099.100

Sikabau, Maret 2022

KEPALA DINAS DPMPTSP,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NALDI. S.STP.,M.Si
NIP. 19820411200012 1 002

Kesenjangan / IKU

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KESENJANGAN GENDER ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

SKPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN DHARMASRAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi **Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi** **Tujuan : Menyediakan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif dan Berdaya Saing**	**Data Pembuka Wawasan** ➢ *Jumlah angkatan Kerja laki laki 68.534 perempuan 34.030* ➢ *Penganggura n Laki laki 1.93% penganggura n perempuan 2.68%* ➢ *Kementerian Ketenaga Ketenaga Kerjaan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi berdasarkan DIPA 0.26.13.2.089 378/2022 tanggal 17 November 2021*	**Isu Gender** **Faktor Kesenjangan** ➢ *Akses Kuato pelatihan dan anggaran yang belum memedai* ➢ *Partisipasi Jumlah Pengangguran yang dibina laki laki 34 orang dan perempuan 46 orang* *Control Jumlah pengangguran yang ada di Dharmasraya* ➢ *Manfaat Jenis Pembinaan yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan*	**Sebab Kesenjangan Internal** - *Masih kuranngnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas untuk menampung dan meningkatkan keberdayaan peserta pelatihan* - *Masih Belum adanya kerjasama dengan pihak swasta yang mau menerima/ memperkerjakan*	**Sebab Kesenjangan Eksternal** *Rendahnya penampungan bagi peserta perempuan untukmendapatkan pekerjaan*	**Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan** **Reformulasi Tujuan** *Meningkatkan Keterampilan bagi angkatan kerja dan mengurangi kerentanan ekonomi*	**Rencana Aksi** ➢ *Dengan Instansi melakukan perekrutan peserta pelatihan* ➢ *Melakukan identifikasi peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin dan usia* ➢ *Meningkatkan sarana prasrana sehingga kegiatan yang dilakukan dapat maksimal* ➢ *Memberikan motivasi dan pengertian peserta*	**Monitoring** **Data Dasar (Baseline)** ➢ *Merekrut peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 80 orang dari keseluruhan dengan satu paket kegiatan dengan peserta 16 orang per paket* ➢ ➢	**Indikator Gender** *Output : Jumlah angkatan kerja yang mengikuti pelatihan yang Responsif Gender* *Outcome:* ➢ *Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan* ➢ *Jumlah tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera*

			peserta pelatihan - - *Tidak adanya tindak lanjut setelah kegitan tersebut dilakukan*					

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINAS,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KAB. DHARMASRAYA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KANDAM, S.Sos
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19670607 199103 1 004

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA	Asnil. AP, M.SI	Paryanto, S.Sos,M.T	BOBBY P. RIZA, S.STP,M.Si
NIP 19681220 199009 1 001	NIP 19750225 199501 1 001	NIP 19690609 198902 1 001	NIP 19820521 200012 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

<table>
<tr><td>PROGRAM</td><td colspan="3">Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja</td></tr>
<tr><td>KODE PROGRAM</td><td colspan="3">2.07.1</td></tr>
<tr><td>KEGIATAN</td><td colspan="3">Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit kompetensi</td></tr>
<tr><td>HASIL/OUTPUT</td><td colspan="3">Meningkatnya angkatan kerja yang terlatih dan berkompeten</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ANALISA SITUASI</td><td colspan="3">1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)
➢ Merekrut 80 angkatan kerja Peserta Pelatihan yang lebih banyak diikuti peserta perempuan di bandingkan laki laki Yaitu
Laki-laki 42.5%
Perempuan 57.5%
➢ Adapun Jumlah intruktur pelatihan sebanyak 7 orang
➢ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan mendapat 15 Paket setiap paket pesertanya 16 orang angkatan kerja
➢ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Permenaker No20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan badan milik Negara bidang ketenagakerjaan.
➢ Kementerian Ketenaga kerjaan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis kompetensi berdasarkan DIPA 026.13.2.089378/2022. Satuan kerja balai latihan kerja padang Direktorat Jendral pembinaan pelatihan dan produktivitas tahun anggaran 2022.</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
➢ Akses
Masih kurangnya kuato pelatihan dan anggaran yang belum memadai
➢ Partisipasi
Jumlah Pengangguran yang dibina, saat ini dengan jumlah laki 42.5 % dan perempuan 57.5%
➢ Manfaat
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
b. Penyebab Internal
Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas untuk menampung dan meningkatkan keberdayaan peserta pelatihan
c. Penyebab Eksternal
Rendahnya penampungan bagi peserta perempuan untuk mendapatkan pekerjaan.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">RENCANA AKSI</td><td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td><td colspan="2">➢ Merekrut peserta pendidikan dan pelatihan yang responsive gender</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td>Meningkatnya Pendidikan dan Keterampilan serta keahlian bagi angkatan kerja</td></tr>
<tr><td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp. 990.474.000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td></td></tr>
<tr><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr>
</table>

	Total Anggaran	**Rp. 990.474.000**
Capaian Program	**Out put** Meningkatnya angkatan kerja yang terlatih dan berkompeten yang Responsif Gender **Out come** Meningkatnya angkatan kerja yang mempunyai kemampuan dengan keahlian dan keterampilan yang responsife gender, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan berdaya guna.	

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINAS,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KAB. DHARMASRAYA

KANDAM, S.Sos
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 19670607 199103 1 004

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	KepalaBapppeda	KepalaDinasSosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	Astril, AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S.Sos,M.T NIP 19660609 198902 1 001	BOBBY R. RIZA, S.STP,M.Si NIP 19820521 200012 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program		Program Pelatihan kerja dan produktifitas Tenaga kerja
Sasaran Program		Meningkatnya Pelatihan Kerja yang berdasarkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi pencari Kerja Berdasarkan Klaster kompetensi
Latar Belakang	Dasar Hukum	➢ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Permenaker No20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan badan milik Negara bidang ketenagakerjaan. ➢ Kementerian Ketenagakerjaan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Komptensi berdasarkan DIPA 026.13.2.089378/2022. Satuan kerja balai latihan kerja padang Direktorat Jendral pembinaan pelatihan dan produktivitas tahun anggaran 2022.
	Gambaran Umum	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
	Indikator Kinerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Bertambahnya Pengetahuan Pendidikan Keterampilan dan Keahlian bagi Angkatan Kerja
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Merekrut Angkatan Kerja untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : UPT BLK Sungai Dareh Penanggung Jawab : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Jadwal		Bulan Januari s/d Juni 2022
Biaya		Rp. 990.474.000

Pulau Punjung, 30 Maret 2022

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KANDAM, S.Sos
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670607199103 1 004